

LAPORAN PENELITIAN STIMULUS



***PERJALANAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA:
SEBUAH POTRET PASANG SURUT***

PENGUSUL :
ZULKARNAIN, SIP, M.SI (KETUA)
SAFRIZAL RAMBE, SIP, M.SI (ANGGOTA)

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

1. Judul Penelitian :
Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut

2. Peneliti :
 - a. Nama : Safrizal Rambe SIP, M.Si.
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. NIDN/NIP : 0311027103/0108050748
 - d. Jabatan Struktural :
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas /Jurusan : ISIP/Ilmu Politik
 - g. Alamat : Kampus UNAS, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta
 - h. Telpon/Fax : 021-7806-700/ Fax: 021-780-58-42
 - i. Alamat rumah : Komp. Islamic Village, Jl. Mawaddah XII No. 7A
Kelapa Dua, Karawaci, Tangerang-Banten
 - k. E-mail : safrizal.rambe@yahoo.co.id

3. Jangka Waktu : 1 (satu semester)
4. Usulan Biaya : Rp. 3.153.000,-

Jakarta, 27 Januari 2018

Mengetahui,

Peneliti

Dekan FISIP Universitas Nasional

Dr. Truly Wangsalegawa, MA, M.Ed

Zulkarnain, SIP, M.Si

Disetujui

Wakil Rektor Bidang PPMK

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS.Apt

ABSTRAK

Sebuah negara (pemerintahan) itu bisa dikatakan demokratis bila prasyarat adanya partai politik dipenuhi, tanpa adanya partai politik boleh dikatakan tidak ada demokrasi. Negara demokratis ditandai adanya partai politik yang sehat, tumbuh dan berakar dari bawah- yang menjadikan partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik juga menjadi mekanisme yang sah bagi rekuetmen elit-elit politik yang nantinya bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang legitimate.

Di Indonesia keberadaan partai politik telah lama dikenal, sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu partai politik menjadi sarana perjuangan para *founding fathers* dalam menghadapi kolonialisme. Ketika Indonesia merdeka dengan segera keberadaan partai politik diakui, dan bahkan pemerintah mendorong kemunculan partai politik. Harus diingat, selain wujud pemerintahan yang demokratis serta penyelenggaraan pemilu yang sah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, di sisi yang lain bila pengelolaan sistem kepartaian dan format politik yang dibangun mengarah kepada disintegratif, bahaya dibalik itu juga dapat mengintai. Kita menyaksikan di era Orde Lama sistem multi yang penerapannya dibarengi ketidaksiapan akan perbedaan seringkali menjelma menjadi konflik antar partai.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pokok Masalah
- 1.3. Urgensi Penelitian
- 1.4. Tujuan Penelitian
- 1.5. Jadwal Pelaksanaan

BAB II

KERANGKA TEORI

- 2.1. Teori Partai Politik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1. Pendekatan Penelitian
- 3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
- 3.3. Teknik Analisis Data

BAB IV

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi, satu hal yang tak dapat dipisahkan adalah pentingnya partai politik sebagai salah satu instrumen bagi upaya mewujudkan sistem politik yang demokratis. Para ahli mengatakan pengelolaan sebuah negara (pemerintahan) itu bisa dikatakan demokratis bila prasyarat adanya partai politik dipenuhi, tanpa adanya partai politik boleh dikatakan tidak ada demokrasi. Negara demokratis ditandai adanya partai politik yang sehat, tumbuh dan berakar dari bawah-yang menjadikan partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik juga menjadi mekanisme yang sah bagi rekrutmen elit-elit politik yang nantinya bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang legitimate.

Di Indonesia keberadaan partai politik telah lama dikenal, sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu partai politik menjadi sarana perjuangan para *founding fathers* dalam menghadapi kolonialisme. Ketika Indonesia merdeka dengan segera keberadaan partai politik diakui, dan bahkan pemerintah mendorong kemunculan partai politik. Harus diingat, selain wujud pemerintahan yang demokratis serta penyelenggaraan pemilu yang sah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, di sisi yang lain bila pengelolaan sistem kepartaian dan format politik yang dibangun mengarah kepada disintegratif, bahaya dibalik itu juga dapat mengintai. Kita menyaksikan di era Orde Lama sistem multi yang penerapannya dibarengi ketidaksiapan akan perbedaan seringkali menjelma menjadi konflik antar partai.

Memang di negara-negara barat penerapan sistem multi partai yang telah puluhan tahun mereka terapkan bisa menghasilkan sistem politik yang stabil. Namun yang berbeda dari penerapan sistem multi partai di negara-negara barat dan di Indonesia, lebih terletak pada perpaduan sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Bila di negara-negara barat memang sistem multi partai yang ada diterapkan dalam model sistem pemerintahan parlementer namun di Indonesia sekalipun sistem parlementer pernah dipergunakan, di era demokrasi dipimpin sistem presidensial yang dipakai. Menurut para ahli sistem pemerintahan parlementer sebenarnya lebih sesuai dengan sistem multi partai sederhana, sedangkan sistem pemerintahan presidensial lebih sesuai diterapkan dalam negara yang mempraktekan sistem dwi partai atau sebanyak-banyaknya multi partai sederhana. Belajar dari pendapat para ahli tersebut yang terjadi di Indonesia berbalikan dengan hakekat diintroduksinya partai politik demi terwujudnya sistem politik yang stabil, kita justru memakai sistem pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multi partai ekstrim yang menurut para ahli sulit untuk dikombinasikan. Hasilnya seperti yang kita saksikan dalam paper ini ternyata memang tidak mudah, sistem multi partai

menghasilkan sistem pemerintahan yang jatuh bangun dan konflik antar partai politik kerap terjadi.

Penelitian ini mengkaji partai politik di Indonesia, sejak awal kelahirannya di era revolusi fisik, masa Orde Baru hingga era reformasi saat ini, kelahiran dan perannya dalam kehidupan politik serta eksese-eksese negatif yang ditimbulkannya. Bagi kita bangsa Indonesia yang tengah membangun negara di alam reformasi ini, mendiskusikan partai politik dan mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi di era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tentu penting dan bernilai strategis dan evaluatif. Orde Lama dan era reformasi ditinjau dari sistem kepartaian yang diterapkannya mirip, sama-sama multi partai terutama dengan era demokrasi terpimpin yang juga mengawinkannya dengan sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dikatakan dengan demokrasi liberal, kurun waktu 1945-1959 yang ditandai dengan dominasi partai politik dalam kehidupan politik Indonesia juga saat ini perwujudannya kita lihat di era reformasi. Karena itu dengan berbagai kesamaan seperti yang telah diuraikan, penulis berharap kajian ini berguna, bukan hanya sekedar mengambil pelajaran dari kurun waktu yang diteliti namun juga memberikan pelajaran bagi kita saat ini.

1.2. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini adalah *“bagaimana sejarah perjalanan partai politik di Indonesia dan perannya sejak era Orde Lama hingga Orde Reformasi?”*

1.3. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, dari sisi teoritis terutama dari sudut pandang Ilmu Politik maka penelitian ini akan memperkaya kajian dan pemahaman kita akan peranan partai politik dalam kaitannya dengan pengembangan *Political Science* di Indonesia. *Kedua*, dari sisi praktis maka penelitian ini juga berguna untuk menggambarkan peranan partai politik dan berbagai permasalahan yang timbul di sekitarnya serta implikasinya dalam kehidupan politik di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, menemukan dan menjelaskan peranan partai politik dalam kehidupan politik di Indonesia, mulai dari era Orde Lama hingga era Orde Baru. *Kedua*, menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi bangsa Indonesia utamanya para pengambil keputusan, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar kedepannya dapat mengantisipasi berbagai kekurangan yang terlihat dalam penataan sistem politik di Indonesia termasuk di dalamnya menyangkut partai politik.

1.5. Jadwal Pelaksanaan

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

BulanMaret: Pengumpulan bahan-bahan yang terkait; buku-buku referensi, koran, majalah, media online dan peaturan perundang-undangan yang terkait.

Bulan April: Proses penulisan

Bulan Mei: Proses penulisan

Bulan Juni:Proses Penulisan

Bulan Juli:Finishing dan diskusi di kalangan terbatas

Bulan Agustus:Penyerahan Laporan penelitian

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau informan, menganalisis data dan menafsirkan makna data atau interpretasi data.¹ Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan atau informan.² Dalam pandangan yang lain Moleong mengatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Metode kualitatif juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Metode ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Asumsi-asumsi umum tentang karakteristik yang terdapat dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif muncul dalam setting yang alamiah dimana didalamnya ada banyak perilaku dan peristiwa kemanusiaan yang terjadi.
2. Penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi yang sangat berbeda dengan rancangan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak ada teori atau hipotesis yang dibangun secara apriori.
3. Penelitian kualitatif lebih memprioritaskan peneliti ketimbang mekanisme yang tak bernyawa sebagai instrumen primer dalam pengumpulan data.
4. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data disajikan dalam bentuk kata-kata (utamanya kata-kata partisipan/informan) atau gambar ketimbang angka.
5. Penelitian kualitatif menekankan pada persepsi dan pengalaman partisipan/informan serta cara mereka memaknai hidup, maka dari itu penelitian ini berusaha memahami, tidak hanya satu tetapi banyak realitas.

¹ John W. Cresswell, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Terj. Ahmad Fawaid dan Rismayanti Kusmini Pancasari, Edisi Keempat, (Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2016), hal. 4-5

² *Ibid.*, hal. 24

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6

6. Penelitian kualitatif fokus pada proses-proses yang terjadi atau hasil dan outcome. Penelitian kualitatif khususnya tertarik pada usaha untuk memahami bagaimana sesuatu itu muncul.
7. Dalam penelitian kualitatif diterapkan interpretasi. Data diinterpretasikan dalam hubungannya dengan partikularitas satu kasus dari pada generalisasi-generalisasi.
8. Penelitian kualitatif merupakan suatu rancangan dimana didalamnya peneliti dapat menegosiasikan hasil penelitian. Makna dan interpretasi dinegosiasikan dengan sumber data, karena inilah realitas subyek yang memang ingin direkonstruksikan oleh seorang peneliti kualitatif.
9. Tradisi penelitian ini bertumpu pada penerapan pengetahuan yang tersirat (pengetahuan intuitif atau perasaan) karena seringkali nuansa dari beragam realitas hanya dapat diapresiasi dengan cara ini. Maka bentuk datanya tidak bisa dihitung (*not quantifiable*) dalam pengertian yang biasa.
10. Objektivitas dan kebenaran menjadi dua hal yang sangat penting dalam tradisi penelitian kualitatif. Akan tetapi kriteria untuk mempertimbangkan penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pertama dan yang utama penelitian kualitatif lebih berusaha untuk mencari keterpercayaan (*believability*) yang didasarkan pada koherensi, kegunaan instrumental dan pengetahuan serta berdasarkan pada sesuatu yang dapat dipercaya (*trustworthiness*) melalui proses verifikasi dari pada melalui pengukuran validitas dan realibilitas pada umumnya.⁴

Dari penjelasan Cresswell dan Moleong sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa metode kualitatif sesungguhnya adalah metode yang tergolong fleksibel dalam penggunaannya dan sangat disesuaikan dengan konteks apa yang akan diamati. Oleh karena datanya lebih bersifat dinamis maka sangat dimungkinkan bila sering terjadi perubahan-perubahan, artinya perubahan-perubahan dapat terjadi dengan menyesuaikan pada data-data yang ditemukan.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini tentu karena beberapa alasan. *Pertama*, adalah karena objek penelitian yang digunakan dalam kasus ini sesuai dengan bentuk dinamika politik Indonesia yang cenderung berubah-ubah. *Kedua*, penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan di sekitar prospek pemakaian sistem distrik dalam pemilu di Indonesia.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat sejumlah data yang akan digunakan sebagai sumber data dan kemudian akan dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan analisa. Data-data ini diklasifikasikan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer antara lain berasal

⁴ Cresswell, *Ibid.*, hal. 275-276

dari Undang-Undang Pilkada dan turunannya menyangkut pelaksanaan Pilkada. Selanjutnya adalah data yang bersifat sekunder, yang bersumber pada buku-buku dan surat-surat kabar yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan Pilkada.

Data-data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, selanjutnya diklasifikasi dan dikategorikan kepada aspek-aspek tertentu sesuai dengan dimensi penelitian lalu diolah sedemikian rupa sehingga menjadikannya sebagai sumber data yang sudah terstruktur. Dari sinilah kemudian peneliti menganalisa dan mengembangkannya sampai pada tahap penyusunan yang sistematis, berupa kata-kata dan pernyataan-pernyataan.

2. Teknik Pengumpulan Data

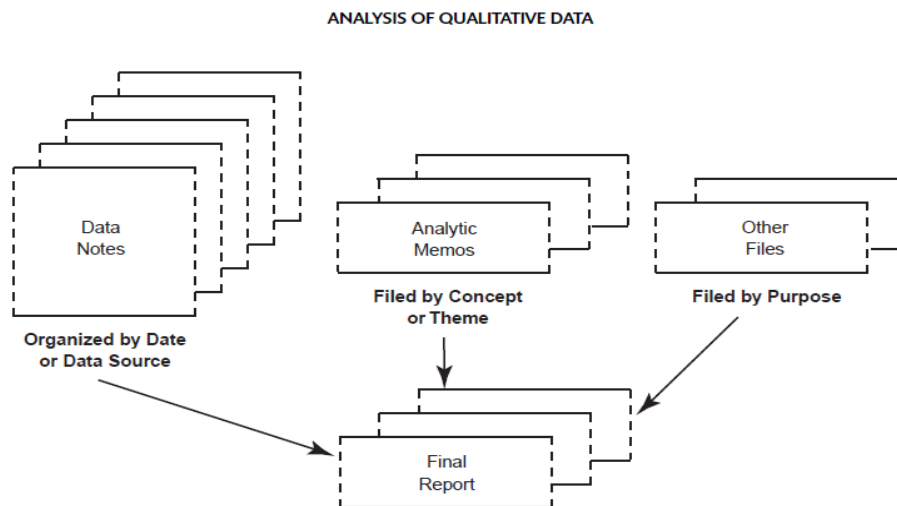
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui pengumpulan data-data dokumen dan wawancara. Selanjutnya, jumlah narasumber yang akan dijadikan sebagai sumber data, peneliti mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Creswell. Menurut Creswell tidak ada ketentuan yang pasti mengenai berapa banyak sampel yang akan ditetapkan dalam penelitian kualitatif. Ukuran sampel tergantung pada rancangan kualitatif yang digunakan (misalnya etnografi atau studi kasus). Dari review Creswell terhadap banyak penelitian kualitatif, ditemukannya bahwa dalam penelitian kualitatif yang bersifat naratif jumlah informan adalah sebanyak 1-2 orang, kualitatif yang bersifat fenomenologi umumnya terdiri dari 3-10 orang informan, sedangkan kualitatif yang bersifat *grounded theory* berjumlah antara 20-30 orang informan. Adapun yang sifatnya etnografi dapat meneliti satu kelompok budaya tertentu saja serta yang sifatnya studi kasus mencakup 4-5 kasus.⁵ Di dalam penelitian ini, karena metode penelitian kualitatifnya masuk dalam kategori yang bersifat fenomenologi maka jumlah informannya adalah 3-10 orang.

3.3. Teknik Analisa Data

1. Model Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari hasil penelitian diberbagai sumber dan informasi yang diperoleh sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dipelajari dan ditelaah sehingga mendapatkan inti yang dibuat sebagai rangkuman penelitian. Hasil dari wawancara berupa pernyataan-pernyataan penting yang berasal dari informan harus tetap dijaga sehingga tetap ada dan pada akhirnya diperoleh kesimpulan penelitian.

⁵ Creswell, *Ibid.*, hal. 253-254.



Sumber : W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches*, Seventh editions, Edinburgh Gate London; Pearson Education Limited, 2014, hal. 485.

Menganalisis berbagai bentuk data kualitatif pada umumnya dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya kembali hingga pada tingkat yang tersusun secara sistematis dan logis. Dalam analisis data, peneliti memperhatikan aspek kesinambungan antara bagian-bagian atau paparan yang satu dengan yang lain pada tahap pelaporan hasil penelitian. Sehingga tidak ada makna yang terpisah diantara bagian-bagian pemaparan dari keseluruhan sistematika pelaporan hasilnya.

Kegiatan pengolahan dan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pemrosesan data; Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dari lapangan, mengkaji seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber dan instrumen penelitian kemudian mengelompokkan informasi dan dirangkum serta digambarkan secara naratif. *Kedua*, Kategorisasi; Kategorisasi merupakan rangkuman data yang disusun atas dasar pikiran, intuisi dan pendapat yang berdasarkan kriteria tertentu dan ditempatkan pada kategori masing-masing. Penulis membentuk kategori informasi dan memberikannya kode. Proses ini melibatkan apa yang disebut dengan memecah informasi. *Ketiga*, Penafsiran data; Penafsiran data dijabarkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian ditafsirkan terhadap hasil analisis yang berhubungan dengan teori-teori yang berkaitan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang diteliti. Interpretasi data yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari panduan yang berasal dari konseptualisasi teori.

Penafsiran data dijabarkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian ditafsirkan terhadap hasil analisis yang berhubungan dengan teori-teori yang berkaitan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang diteliti. Interpretasi data yang

dilakukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari panduan yang berasal dari konseptualisasi teori.

2. Validasi Data

Memeriksa kebenaran data adalah kegiatan yang tidak terlepas dari tingkat kepuasan peneliti menggunakan sumber data yang sudah terkumpul sebelumnya. Oleh karena itu memastikan kebenaran atas sebuah data mutlak dilakukan. Kegiatan validasi data yang akan dilakukan adalah memeriksa data-data yang sudah terkumpul, lalu mengkonfirmasi kembali dengan data yang telah dikumpulkan, baru kemudian melakukan penyusunan atau kategorisasi data lanjutan. Kegiatan ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh kepastian yang relatif dinilai tepat oleh peneliti. Validasi data ini juga terkait dengan kegiatan *cek and recheck* atas data yang terkumpul. Jika di tengah proses penelitian ditemukan masalah pada data, maka peneliti wajib melakukan perbaikan atas data dari temuan yang terbaru.

BAB IV

PARTAI POLITIK DALAM LINTASAN SEJARAH

4.1. Partai Politik di Era Orde Lama

4.1.1. Maklumat No. X, 3 November 1945; Awal Kemunculan Partai Politik

Keberadaan partai politik sebenarnya telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ciri khas bagi kelahiran partai-partai politik di masa pergerakan kebangsaan ada pada penglihatan mereka bahwa perjuangan kebangsaan akan lebih efektif bila dilakukan melalui persyarikatan yang ada, yang lambat laun mereka organisir secara modern dalam bentuk partai politik. Diawali dengan pendirian Sarekat Islam yang merupakan pelopor kebangkitan nasional Indonesia di tahun 1905,⁶ Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Indische Partij, Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV) dan Indische Social Demokratische Partij (ISDP) dua partai yang merupakan pendahulu bagi tumbuhnya gerakan marxis di Indonesia, Jamiat Khair, Al Irsyad, Perhimpunan Pemuda, Persatuan Islam (Persis), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan), Partai Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Partai Persatuan Indonesia (Parpindo), Partai Rakyat Indonesia dan Partai Indonesia Raya (Parindra).

Organisasi-organisasi tersebut sebagian saat Indonesia dibawah pendudukan Jepang hilang, baik karena vakum dan membekukan organisasinya seperti yang dialami PSII,⁷ atau memang telah hilang dan membubarkan diri sejak beberapa tahun sebelumnya. Pasca kemerdekaan beberapa partai kemudian mereorganisasi diri untuk melanjutkan perjuangannya di alam kemerdekaan, dan menjadikannya sebagai infrastruktur terpenting dalam sistem politik Indonesia. Sejak itu partai politik ramai bermunculan, mengalami pasang dan surut namun pengaruhnya terasa hingga ke masa kita sekarang (2009). Namun tidak banyak orang tahu bahwa munculnya partai politik beberapa saat setelah Proklamasi kemerdekaan didorong oleh sejumlah rentetan peristiwa.

⁶ Mengenai posisi Sarekat Islam dalam kepeloporannya dalam membangkitkan nasionalisme Indonesia, lihat Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia, 2008).

⁷ Karena tekanan yang kuat dari pemerintah pendudukan Jepang yang tidak memberi toleransi bagi hidupnya partai-partai politik, maka setelah mempertimbangkan banyak hal akhirnya pimpinan Lajnah Tanfidziah PSII pada tanggal 14 April 1942 mengeluarkan Maklumat No. 12/1942 yang menetapkan *uzur* atau menanggukhan kegiatan organisasinya. Maklumat ini juga membebaskan setiap anggota partai bergerak secara individual, sesuai bakat dan kemampuannya masing-masing. Hemat penulis maklumat ini adalah pernyataan pembekuan sementara partai dan kelak bisa saja dihidupkan kembali, jadi PSII bukan bubar. Untuk lebih jelasnya lihat HAR. Moesthofa Kamil, *Daftar Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Perjuangan Partai Syarikat Islam*, tt, tt. Lihat juga Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal. 142, Carl Van Tjik, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1993), hal. 32.

Pasca Proklamasi, masuknya tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda (NICA) ke Indonesia telah menimbulkan situasi genting, peperangan berkobar di banyak tempat dan ancaman penangkapan pada para pemimpin negara juga semakin nyata. Di sisi yang lain kekuatan pemuda yang dari sejak awal Agustus telah menampakkan perbedaan yang mencolok dengan kesimpulan para pemimpin-pemimpin tua seperti Soekarno-Hatta, juga semakin melebar. Para pemuda yang berkumpul di sekeliling dua pemimpin gerakan bawah tanah, Sjahrir dan Tan Malaka melihat pemerintahan yang ada lemah dalam menghadapi kembalinya militer Belanda ke Indonesia.

Beberapa peristiwa seperti diculiknya Soekarno-Hatta oleh para pemuda ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka berdua segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia, serta sikap yang ditunjukkan Soekarno-Hatta dalam menanggapi radikalisme pemuda di berbagai pertempuran heroik di kota-kota besar Jawa, maupun pengorganisasian rapat raksasa di lapangan Ikada semakin menunjukkan pada para pemuda bahwa pemimpin-pemimpin mereka yang lebih senior kurang dapat diharapkan untuk bertindak radikal. Di mata mereka pemerintahan yang ada terlalu lamban.⁸

Di sisi yang lain kabinet Presidensial yang terbentuk pasca Proklamasi yang awalnya relatif kuat berkat hubungan yang mereka bina dengan Jepang, seiring dengan masuknya tentara sekutu mulai menimbulkan sejumlah kesulitan bagi kabinet Soekarno-Hatta. Belanda sikapnya tentu sangat bermusuhan dan menuduh kabinet ini dipimpin dan diisi oleh para “kolaborator” Jepang, Belanda lantas mempropagandakan bahwa pemerintahan yang terbentuk tidak *legitimate* dan mengatakan bahwa Soekarno-Hatta adalah para “kriminal-kriminal” perang yang harus ditangkap.

Dalam kondisi seperti ini ada konsensus di berbagai kalangan yang sadar politik di Jakarta bahwa pemerintahan yang konservatif ini harus segera diakhiri, dan ini hanya bisa dilakukan dengan merombak pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang baru yang dirasakan dapat mengambil tindakan cepat untuk mengimbangi situasi yang sedang berubah.⁹ Orang yang berada di belakang gerakan-gerakan ini adalah Sutan Sjahrir yang pengaruhnya kuat di kalangan pemuda. Sjahrir yang disebut Anderson tengah mempersiapkan “kudeta diam-diam”,¹⁰ berencana untuk mengubah sistem pemerintahan Presidensial ke sistem pemerintahan Parlementer model Eropa. Model ini menurutnya lebih cocok diadopsi Indonesia dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai negara yang demokratis, dan ini cocok dengan pemikiran politiknya yang dipandu oleh gagasan-gagasan demokratis Barat.

Langkah pertama yang dilakukan Sjahrir adalah pada tanggal 7 Oktober mengorganisir lima puluh orang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari 150 orang anggotanya untuk menandatangani petisi pada Soekarno-Hatta agar memberikan status

⁸ Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 198.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lihat Bab VIII “Kudeta Diam-Diam” pada karya Anderson, *op. cit.*, hal. 195-218. Namun anehnya peran setral Sjahrir dalam perubahan sistem pemerintahan tersebut tidak dikaji secara mendalam di biografi terlengkap Sjahrir yang ditulis oleh Rudolf Mrazek, *Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Mochtar Pabotinggi, Matheos Nale dan S. Maimoen, (Jakarta: Obor, 1996).

legislatif yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹¹ Walaupun ada orang-orang dalam pemerintahan Soekarno-Hatta yang berkeberatan umumnya mereka semua mengetahui bahwa pemerintahan yang demokratis bagi Indonesia adalah bagian dari jawaban atas tuduhan yang dialamatkan Belanda bahwa pemerintahan yang ada adalah pemerintahan bentukan Jepang yang berbau diktator.¹² Dukungan yang kuat untuk gerakan ini juga datang dari Hatta dan karenanya seperti yang nanti kita lihat, peralihan sistem pemerintahan Presidensial ke Parlemen dan pemberlakuan sistem multi partai dapat berjalan tanpa banyak kendala.¹³

Pada tanggal 16 Oktober saat KNIP sedang melangsungkan rapat lengkapnya yang kedua suatu Maklumat No X yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Hatta,¹⁴ semakin memperjelas kedudukan KNIP.¹⁵ KNIP menjadi pengganti DPR dan disamping itu juga mengambil sebagian tugas-tugas yang menurut konstitusi dimiliki oleh MPR berkenaan dengan penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dirumuskan bersama Presiden.¹⁶ Untuk kerja sehari-hari dibentuklah Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) yang berfungsi sebagai Parlemen yang efektif. Sejak itu kebijaksanaan politik pemerintah pun mulai beralih dari Presiden kepada BP KNIP.¹⁷ Rapat KNIP yang membicarakan reorganisasi badan ini berjalan dengan banyak perdebatan, salah satunya memutuskan untuk menunjuk Sjahrir dan Amir Syarifuddin sebagai formatur untuk BP KNIP itu.¹⁸

Rapat juga membahas mosi dari Sukarni untuk memberi muatan lebih revolusioner pada KNI sambil memberikan dukungan bagi perlawanan rakyat. Tokoh-tokoh tua seperti Kasman Singodimedjo yang menjabat Ketua Komite Nasional disingkirkan untuk diganti dengan Adam Malik yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua III KNI. Sartono dan Latharhary yang berusaha mempertahankan kepemimpinan tokoh-tokoh tua dan pemerintah, pengaruhnya tidak banyak berarti.¹⁹ Sjahrir dan Amir kemudian mengumumkan keanggotaan BP KNIP yang diisi oleh 15 orang yang diketuai oleh Sjahrir dan Amir Syarifuddin, wakilnya.²⁰ Tak lama setelah BP KNIP terbentuk kemudian Sjahrir mendapatkan dukungan tambahan 38 anggota baru (anggota KNIP

¹¹ Kahin, *op. cit.*, hal. 191.

¹² *Ibid.*, hal. 200.

¹³ Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 286.

¹⁴ Nomor X dalam Maklumat tersebut menimbulkan kebingungan di banyak orang yang mengartikannya sebagai nomor 10 dalam angka romawi. Sebenarnya penomoran tersebut tidaklah disengaja, menurut Pringgodigdo yang saat itu menjabat Sekretaris Negara saat Hatta menandatangani ia lupa membawa arsip-arsip negara yang lain sehingga diputuskan untuk memberikan nomor "X" sebagai angka yang tidak diketahui. Lihat Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 201-202 catatan no. 8

¹⁵ Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 201.

¹⁶ Dekrit Presiden No. 10 (1945), Berita Republik Indonesia, I, No. 2, 1 Desember 1945 dan "Berita Badan Pekerja", 17 Oktober 1945-25 November 1945 sebagaimana yang dikutip oleh Kahin, *op. cit.*, hal. 191.

¹⁷ Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, *op. cit.*, hal. 202-203.

¹⁸ Namun Sjahrir dan Syarifuddin menolak mengetuai badan tersebut kalau tidak diberikan hak untuk memilih anggotanya, lihat Kahin, *op. cit.*, hal. 192.

¹⁹ Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 202.

²⁰ 13 anggota lainnya adalah Mr. Suwandi, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, KH. Wachid Hasyim, Mr. R. Hendromartono, Dr. RM. Soenario Kolopaking, Dr. A. Halim, Soebadio Sastrosatomo, Mr. Tan Ling Djie, Supeno, Sri Mangunsarkoro, Adam Malik, Tajaludin dan Dr. Soedarsono. Lihat Kahin, *op. cit.*, hal. 192 dan Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 203.

menjadi 188) yang banyak diantaranya adalah pendukung-pendukung Sjahrir yang paling gigih.²¹

Langkah kedua yang dipersiapkan Sjahrir agar peralihan sistem pemerintahan Presidensial dapat lebih cocok dengan Parlemerter yang sedang dipersiapkannya adalah, dengan mempersiapkan infrastruktur sistem kepartaian yang ada dari partai tunggal ke sistem multi partai. Sistem multi partai yang akan diterapkan diharapkan dapat menampung semua perwakilan aliran-aliran politik yang ada. Desakan Sjahrir ini disetujui oleh Soekarno yang menyatakan bahwa partai-partai diharapkan telah ada sebelum rencana pemilihan Parlemen yang baru sebagai pengganti KNIP yang sedianya akan diadakan pada Januari 1946.²²

Pemerintah dalam hal ini Hatta kemudian mengeluarkan Maklumat baru No. X tertanggal 3 November²³ yang menghimbau agar rakyat mendirikan partai-partai politik dalam rangka mewadahi aliran-aliran politik yang ada serta perjuangan ke arah pembebasan nasional yang sedang giat-giatnya diperjuangkan rakyat. Maklumat tersebut berbunyi :

**MAKLUMAT PEMERINTAH
(Tanggal 3 November 1945-penyusun)**

**PARTAI POLITIK
Anjuran Pemerintah Tentang
Pembentukan Partai-Partai Politik**

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menyatakan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa :

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

²¹ Kahin, *op. cit.*, hal. 192 dan Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 203.

²² Kahin, *op. cit.*, hal. 194-195.

²³ Penandatanganan Maklumat ini sama seperti Maklumat 16 Oktober 1945 yang dilakukan oleh Hatta menimbulkan pertanyaan kenapa tidak ditandatangani oleh Soekarno. Soekarno saat itu sering bepergian keluar kota padahal pekerjaannya di Jakarta menumpuk, apalagi ternyata seperti yang dikatakan I. Wangsa Wijaya pada Deliar Noer, bahwa kepergian itu tidaklah resmi namun lebih sering karena urusan pribadi. Lihat Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik, op. cit.*, hal. 286.

Jakarta, 3 November 1945

Wakil Presiden
Mohammad Hatta²⁴

Maklumat ini memang terdengar sebagai restu dari pemerintah bagi pendirian partai-partai politik yang ada. Namun sebenarnya ini hanyalah merupakan pengumuman formal bagi tokoh-tokoh politik yang beberapa saat sebelumnya telah mendirikan beberapa partai. Tanggal 11 Oktober 1945 beberapa pemuka kelompok Islam menggelar pertemuan di Yogyakarta untuk menyusun anggaran dasar untuk mereorganisasi kembali Masyumi pra perang untuk menjadi partai politik.²⁵ Masyumi sendiri kemudian dideklarasikan di Yogyakarta dalam Kongres Muslimin Indonesia pada tanggal 7-8 November 1945. Kongres tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa hanya Masyumilah yang menjadi wadah politik umat Islam satu-satunya.²⁶

Kemudian pada tanggal 21 Oktober-nya, di Cirebon PKI dihidupkan kembali setelah kehancurannya pasca pemberontakan 1926-1927.²⁷ Kemudian pada tanggal 1 November di Yogyakarta, pertemuan kaum revolusioner menghasilkan kesepakatan pendirian Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang akan mewadahi kaum buruh, tani, tentara dan pemuda dalam rangka menuju masyarakat sosialis.²⁸ Karenanya saat Hatta memproklamkan anjurannya bagi pendirian partai-partai politik, sebenarnya telah berdiri tiga partai terpenting yang mewakili tiga aliran besar. Namun setelah anjuran Maklumat X tersebut partai politik semakin ramai bermunculan dan ini menandakan era baru dengan di introdusirnya sistem multi partai seiring dengan peralihan sistem pemerintahan Presidensial ke Parlemerter dengan diangkatnya Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama RI.²⁹

Sejak itu keberadaan partai politik dengan sendirinya menjadi penting yang oleh para pengamat bila ingin menunjuk periode dimana partai politik begitu berperan, maka periode demokrasi liberal-lah yang sering dirujuk. Periode ini pula yang kemudian mengilhami sistem multi partai yang kita adopsi di era reformasi ini, namun untungnya kita memakai sistem pemerintahan Presidensialisme, tidak Parlemerter. Kalau Parlemerter yang kita pakai maka jatuh bangunnya pemerintahan seperti di era demokrasi

²⁴Dikutip dari M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 269.

²⁵ Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 205

²⁶ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, (Jakarta: Grafiti, 1987), hal. 41. Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hal. 141-142. Hasil ini disepakati oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Umat Islam Indonesia. Sedangkan organisasi-organisasi Islam yang lainpun kemudian bergabung seperti Persatuan Islam bergabung tahun 1948, Persatuan Ulama Seluruh Aceh tahun 1949, Al Irsyad tahun 1950, Jami'ah Al-Wasliyah dan Al Ittihadiyah tahun 1950 yang kemudian di ikuti oleh Mathla'ul Anwar dan Nahdlatul Wathan. PSII sendiri turut serta sejak awal dalam mempromotori pendirian Masyumi.

²⁷ Harry A. Poerze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid I*, diterjemahkan oleh Hersri Setiawan, (Jakarta: Obor dan KITLV, 2009), hal. 172. Untuk pemberontakan PKI 1926-1927 lihat Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, *op. cit.*, hal. 187.

²⁸ *Berita Indonesia* sebagaimana yang dikutip oleh Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 206

²⁹ Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 207 dan Mrazek, *op. cit.*, hal. 488.

liberal sangat mungkin akan kita saksikan kembali, walau bagi sebagian pengamat kombinasi sistem multi partai yang dikawinkan dengan sistem pemerintahan Presidensial sekarang ini adalah aneh dan tidak cocok dalam teorinya.³⁰

4.1.2.Periode Demokrasi Liberal

Periode demokrasi liberal dalam sejarah politik Indonesia, boleh dikatakan adalah masa-masa dimana kemunculan partai politik dan peranannya mengambil posisi yang amat sentral dalam sistem politik Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas sistem pemerintahan Parlemerter yang dikawinkan dengan sistem multi partai, telah menciptakan kombinasi sistem politik yang mengedepankan arti pentingnya partai politik. Partai-partai inilah yang nantinya merupakan tulang punggung jalannya pemerintahan dalam kabinet, namun demikian banyaknya partai politik telah menyebabkan tidak ada pemerintahan yang dibangun diatas kekuatan mayoritas suara di Parlemen. Karena itu seperti yang kita lihat, ini menyebabkan kabinet yang diperintah oleh satu atau gabungan koalisi partai politik dapat jatuh kapan saja, ketika lawan-lawan politiknya di Parlemen mengajukan mosi tidak percaya.³¹

Periode ini bisa dikatakan sebagai periode “uji coba” atau “eksperimen berdemokrasi” bagi bangsa Indonesia. Ada tokoh-tokoh yang mengedepankan penerapan gagasan demokrasi Barat sebagai jalan keluar bagi pengelolaan pemerintahan negara yang masih muda ini, seperti yang kita lihat dalam pemikirannya Hatta dan Sjahrir. Namun ada juga model Soekarno, Supomo dan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pentingnya penghargaan atas kultur Indonesia (Jawa) dalam pengelolaan pemerintahan yang ada-melalui model seperti negara integralistik³² ataupun “demokrasi berkepemimpinan”.³³ Dua model tersebut satu sama lain saling berinteraksi, ada kalanya satu model diberi kesempatan untuk menjalankan thesis pemikirannya, namun di kesempatan yang lain

³⁰ Mengenai ketidakcocokan kombinasi Presidensialisme dikawinkan dengan sisitem multi partai dapat dilihat dalam disertasi Syamsuddin Haris, *Format Baru Relasi Presiden-DPR Dalam Demokrasi Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008)*, FISIP Universitas Indonesia, 2008.

³¹ Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 107

³² Mengenai pandangan Supomo yang pengaruhnya besar dalam memberikan landasan pada penciptaan model negara kesatuan saat sidang di BPUPKI dan PPKI, lihat Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta: Grafiti, 1997) dan Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 89-92.

³³ Soekarno sendiri jauh-jauh hari telah memperlihatkan sikap resistensinya atas gagasan-gagasan demokrasi barat seperti yang dituliskannya sejak tahun 1930-an. Ia besar dalam tradisi falsafah Jawa dan mengemas sendiri pandangan-pandangan politiknya tentang negara, sesuai dengan kultur yang diterimanya. Dengan demikian walaupun Soekarno berpendidikan barat dan mempelajari khasanah keilmuan barat, namun alam berfikirnya atau “pustakanya” tetap saja nasional, apalagi ia sendiri memang tidak pernah meneruskan studinya di Belanda seperti yang banyak dijalani kaum terdidik paling terkemuka saat itu. Mengenai pandangan politiknya ini lihat pidatonya di muka pengadilan kolonial Belanda yang telah diterbitkan *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983). Sedangkan uraian yang baik dalam menganalisa karya Soekarno ini dilakukan oleh Roger K. Paget dalam *Indonesia Accuses: Sukarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930*. Edited, translated, annotated and Introduced by Roger K. Paget, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975). Mirip dengan pandangan Soekarno tentang demokrasi yang harus memperhatikan akar-akar kultural bangsa, juga dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara seperti yang sering dikemukakannya di Perguruan Taman Siswa, Lihat Kenji Tsuchiya, *Demokrasi dan Kepemimpinan, Kebangkitan Gerakan Taman Siswa*, diterjemahkan oleh HB. Jasin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

begitu dirasa kurang pas dan dinilai gagal maka model yang lain tampil untuk mengoreksinya. Demikianlah kita melihat periode demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin sebenarnya bisa dijelaskan dalam kaca mata tersebut.

Masa-masa bereksperimen seperti ini tentu membutuhkan tokoh-tokoh berpikiran matang selain yang memiliki keterampilan intelektual yang cukup dalam menerapkan gagasan-gagasan orang lain dalam kondisi yang tengah berubah.³⁴ Feith mengatakan periode ini adalah periode dimana “dunia pemikiran politik” dan “dunia realitas politik” amat berdekatan, seorang pemikir politik saat yang bersamaan juga bertindak sebagai politisi yang tengah berusaha untuk mengaplikasikan gagasan besar yang mereka pikirkan.³⁵

Mereka tak kalah dengan para ideolog-ideolog besar dunia, seorang produsen gagasan dan mereka juga seorang pemimpin partai. Soekarno gagasannya mengenai “*Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*” yang ditulisnya tahun 1926³⁶ telah menjadi dasar bagi ideologi Marhaenisme yang dipegang teguh oleh partainya, PNI. Hatta gagasannya tentang demokrasi dan sosialisme demokrat telah menuntunnya untuk mendirikan PNI Pendidikan, dan Sjahrir yang secara ideologis tak jauh berbeda dengan Hatta-kemudian mendirikan partainya sendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI).³⁷ Tan Malaka yang gagasannya mengenai Murbaisme kemudian menemukan kendaraannya dalam Partai Murba yang didirikan oleh para pengikut-pengikutnya.³⁸ Demikian pula dengan Mohammad Natsir yang gagasannya mengenai Islam sebagai dasar negara seperti yang telah dikemukakannya sejak tahun 1930-an, secara nyata kemudian ia perjuangkan dalam Masyumi saat ia memimpin partai ini.³⁹

³⁴ Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 107-108.

³⁵ Lihat bagian Pengantar Herbert Feith dan Lance Castles pada edisi 1970 dalam penerbitan buku mereka, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, diterjemahkan oleh Ain Yubhar, (Jakarta : LP3ES, 1988).

³⁶ Lihat artikelnya “*Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme*” yang awalnya diterbitkan di majalah “*Soeloeh Indonesia Moeda*” dan kemudian dibukukan ke dalam Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi), hal 1-23. Soekarno mengatakan bahwa ketiga ideologi tersebut sebenarnya bisa dikawinkan. Contohnya Nasionalisme, ideologi ini yang kalau di negara-negara terjajah timbul sebagai respon atas kolonialisme, tentu memberi tempat pada Islam dan Marxisme yang juga menentang Imperialisme. Demikian pula dengan Islam dan Marxisme, menurut Soekarno kedua ideologi ini juga dapat dipertemukan. Di Islam, ada konsep mengenai “*riba*” yaitu, membungakan uang yang pada hakekatnya sama dengan konsep “nilai lebih” (*surplus values*) di Marxisme, yaitu sebuah konsep yang mengatakan buruh telah bekerja sekian jam dalam seharinya tetapi tidak mendapatkan upah yang sesuai. Kelebihan terhadap jam kerja itulah yang dapat menghasilkan keuntungan, ini yang dikatakan Marx sebagai “nilai lebih” (*surplus values*) yang oleh Soekarno dipersamakan dengan konsep “*riba*”. Namun sebenarnya yang dipersatukan Soekarno ini semu, dan hanya mempersatukan kulit luarnya saja seperti yang dikatakan Benda ada segi “*master manipulator*” dalam diri Soekarno. Lihat Harry J. Benda dalam pengantar karya Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, diterjemahkan oleh Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. xlii.

³⁷ Mengenai PSI dan peran Sjahrir di dalamnya lihat J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*, diterjemahkan oleh Hasan Basari, (Jakarta: Grafiti, 1993).

³⁸ Mengenai pemikiran Tan Malaka lihat, Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian Terhadap Perjuangan Sang Kiri Nasionalis Jalan Penghubung Memahami Madilog*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Sebelumnya di Bangkok pada 1927 Tan Malaka bersama Subakat dan Jamaluddin Tamin telah mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) yang dibangun di atas thesis-thesis yang kelak dikenal sebagai Murbaisme. Lihat Helen Jarvis, *PARI, Jembatan Emas Tunggal Menuju Republik Indonesia*, diterjemahkan oleh Wasid Soewarto, (Jakarta: Yayasan Massa, 1987).

³⁹ Mengenai peran gagasan-gagasan Natsir dalam Masyumi lihat, Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jama'at-i-Islami*, diterjemahkan

Demikianlah kita lihat tokoh-tokoh dari jenis pemimpin seperti inilah yang kemudian mengisi posisi dan jabatan-jabatan strategis kabinet dan pemerintahan. Ada yang berperan sebagai perumus kebijakan, pegawai negeri, menteri kabinet, beberapa orang yang paling menonjol kemudian memimpin dalam jabatan Perdana Menteri dan banyak pula yang tetap memegang jabatan-jabatan penting dalam partai politik. Namun di periode berikutnya seiring dengan semakin teraturnya roda pemerintahan, serta makin terikatnya orang-orang dengan kepentingan-kepentingan tertentu membuat kebutuhan akan keahlian para professional ini semakin berkurang. Namun seiring dengan “berkurangnya kesadaran bahwa pemerintah merupakan perintis gerakan nasional dan romantika revolusi diganti oleh kelelahan setelah masa revolusi” membuat banyak kaum intelektual ini melihat dirinya bukan lagi orang yang turut dalam pengelolaan negara secara langsung, namun lebih sebagai pengecam-pengecam pemerintah.⁴⁰

Sejak saat itu konflik menjadi lebih terbuka dan menghidupkan kembali pertikaian lama yang sebagian besarnya di dorong oleh faktor ideologi. Konflik ideologi tersebut memang sudah sering terjadi sejak masa Hindia Belanda dahulu. Contohnya dapat kita saksikan dalam pertikaian di tubuh Sarekat Islam yang di dorong atas kemunculan marxisme yang tentu saja bertolak belakang dengan Islam, demikian pula dengan pertikaian Sarekat Islam dengan golongan nasionalis sekuler juga dipicu oleh perbedaan menempatkan relasi agama dan negara dalam bingkai *nation state*.⁴¹

Sulitnya mencapai konsensus diantara partai-partai politik yang ada menurut Arbi Sanit karena dipicu oleh tebalnya ikatan ideologis yang mengelilingi masing-masing partai kala itu. Belum ada ideologi yang menggerakkan para elit untuk dapat saling bekerjasama atas dasar persetujuan fundamental dalam politik, bernegara maupun berbangsa. Akhirnya ideologi yang tadinya diharapkan dapat membawa masyarakat menuju satu kondisi ideal yang dicita-citakan, malah dalam realitasnya berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan. Ideologi-ideologi yang ada bukan hanya sekedar memberikan gambaran akan idealita yang ingin dicapai, namun akhirnya juga berfungsi sebagai hukum yang menilai benar salahnya ideologi-ideologi lain, tanpa berusaha untuk kritis menilai ideologinya sendiri.⁴² Alhasil masyarakat menjadi sukar untuk digerakkan ke satu arah, sekalipun

oleh Mun'im A. Sirry, (Jakarta: Paramadina, 1999). Untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran Natsir yang menjadikan Islam sebagai fundamen dalam bernegara lihat karyanya *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001).

⁴⁰ Feith dan Castles, *op. cit.*, hal. xlii

⁴¹ Mengenai contoh pertikaian Sarekat Islam dengan kaum marxis maupun nasionalis sekuler lainnya dapat dibaca dalam karya Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, *op. cit.*, terutama bab iv dan bab vi.

⁴² Daniel Bell bahkan mengatakan ideologi-ideologi politik yang ada sebenarnya telah usang dan hari ini penjelasan yang menyeluruh menurut ideologi kapitalisme, sosialisme dan komunisme tidak lagi dapat dilakukan. Apa-apa yang diklaim oleh ideologi-ideologi tersebut hanyalah benar pada sebagian serta memberi tekanan pada satu aspek saja, namun di wilayah lain masing-masing ideologi memiliki kelemahan dan karena itu kita melihat interaksi antar ideologi pada akhirnya bermuara pada saling adopsi nilai-nilai antara satu ideologi dengan yang lainnya. Lihat Nuswantoro, *Daniel Bell, Matinya Ideologi*, (Yogyakarta: Indonesiatara, 2001), hal. 145-146

Soekarno dengan penafsiran Pancasila telah berusaha untuk mengarahkan Indonesia menjadi bangsa besar dan dapat bersanding dengan negara-negara besar Barat lainnya.⁴³

Belum lagi persaingan antar partai/kelompok dalam memperebutkan posisi-posisi tertentu yang sebenarnya lebih merupakan kepentingan pribadi maupun partai/kelompok, turut mempertajam pertentangan tersebut di masyarakat.⁴⁴ Sesudah revolusi sikap-sikap ingin menang sendiri memang begitu menggejala di sebagian besar elit-elit politik kita. Faktor penyebabnya antara lain karena belum selesainya pertentangan ideologi yang berasal dari masa pergerakan, disamping tentunya pertentangan-pertentangan lain yang lebih bersifat kepentingan politik maupun pribadi.

Oleh Feith dan Castles yang banyak mengkaji tentang ini, pengelompokan ideologi-ideologi politik tersebut semakin diperjelas, mereka mengatakan ada lima aliran besar yang berkembang di Indonesia, yaitu berturut-turut dari posisi kiri ke kanan adalah komunisme, sosialisme, nasionalisme, tradisionalisme Jawa dan Islam. Kelima aliran ideologi politik tersebut keberadaannya direpresentasikan ke dalam empat partai besar hasil pemilu 1955. PKI mewakili komunisme, PNI mewakili nasionalisme radikal, Masyumi serta NU mewakili Islam. Oleh Feith dan Castles aliran sosialisme demokrat dan tradisionalisme Jawa dalam bagan aliran pemikiran politik yang dibuatnya tidak direpresentasikan ke dalam partai yang ada, walaupun bila dipaksakan bisa diletakan PSI dalam aliran sosialisme demokrat atau PIR (Partai Indonesia Raya) dalam aliran tradisionalisme Jawa. Kedua aliran ideologi yang disebut belakangan menurut Feith dan Castles arti pentingnya tidaklah pada partainya, namun lebih pada pengaruh aliran pemikiran politik tersebut terhadap partai-partai yang lain, seperti aliran sosialisme demokrat yang mempengaruhi PNI dan Masyumi serta tradisionalisme Jawa yang mempengaruhi PNI, NU dan juga bersinggungan dengan aliran komunisme.⁴⁵

Seperti yang dijelaskan diatas karena masing-masing aliran direpresentasikan ke dalam wadah partai politik sebagai pengusung dari ideologi politik tersebut, maka yang terjadi dengan pertentangan partai politik dapat dikatakan juga sebagai wujud pertentangan ideologi-ideologi politik tersebut. Pertentangan tersebut paling hebat terjelma dalam tiga peristiwa besar yang menurut hemat penulis merupakan representasi dari pertikaian ideologis tersebut. Dua peristiwa menyangkut perdebatan yang terkait dengan dasar negara antara golongan nasionalis Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara seperti yang ditunjukkan di forum BPU PKI/PPKI dan Konstituante dengan golongan kebangsaan yang menginginkan relasi agama dengan negara (Islam) dipisahkan dan menjadikan kebangsaan sebagai tali pengikat *nation state*.⁴⁶

⁴³ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Jakarta: Rajawali, 2005), hal. 32.

⁴⁴ Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 110.

⁴⁵ Lihat Feith dan Castles, *op. cit.* Namun oleh Alfian pembagian ini dikritik dengan mempertanyakan kenapa Pancasila dan pemikiran politik tentara tidak dimasukkan, padahal keduanya eksis dan turut dalam pertukaran wacana di era Orde Lama. Lihat Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 97-111.

⁴⁶ Mengenai perdebatan dasar negara antara golongan nasionalis Islam dengan golongan nasionalis sekuler ada beberapa karya yang mengkajinya, Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus*

Peristiwa ketiga adalah saat terjadinya G30S/PKI dimana peristiwa ini juga mewakili kepentingan agresif perjuangan ideologis PKI dalam menyebarkan komunisme di Indonesia. Kalaupun seperti yang ditunjukkan oleh penelitian beberapa pakar bahwa peristiwa tersebut sangat mungkin merupakan kombinasi banyak “pemain” dan sampai saat ini masih “*debatable*” terkait dengan PKI sebagai pelaku tunggal,⁴⁷ namun yang pasti usaha ke arah tersebut telah menjadi karakter PKI sama seperti peristiwa pemberontakan 1926/1927⁴⁸ dan Madiun 1948.⁴⁹ Bahkan Willfred T. Neil menyebut bahwa “kaum komunis secara rahasia telah menetapkan tahun 1970 sebagai tahun pengambilalihan seluruh Indonesia”.⁵⁰

Ditinjau dari sudut budaya politik, Alfian menyebut kecenderungan untuk berkonflik yang merupakan wujud dari masyarakat Indonesia yang plural, memang merupakan satu ciri yang berasal dari zaman pergerakan. Namun untungnya konflik tersebut selalu bisa diselesaikan melalui konsensus yang ada dan tidak sampai menjelma menjadi konfrontasi fisik yang membahayakan barisan kaum pergerakan. Konsensus lebih sering muncul di tubuh kaum pergerakan dengan membentuk berbagai badan federasi untuk menyatukan langkah organisasi-organisasi politik yang ada, seperti PPPKI (Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia),⁵¹ dan dikalangan organisasi-organisasi Islam muncul wadah Kongres Umat Islam.⁵²

Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Ridwan Saidi, *Piagam Jakarta Tinjauan Hukum dan Sejarah*, (Jakarta: GPMI, 2007), Umar Basalim, *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Islam Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985) dan Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Legal Atas Konstituante 1956-1959*, diterjemahkan oleh Silvia Tiwon, (Jakarta: Grafiti, 1995), Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, diterjemahkan oleh Imron Rosyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Padma, 2003). Sedangkan risalah pidato para tokoh-tokoh golongan Islam di Konstituante, lihat *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957, Pidato M. Natsir, Abdul Kahar Muzakkir, Hamka, Isa Anhary dan Kasman Singodimedjo*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001).

⁴⁷ Setidaknya ini dikemukakan oleh dua peneliti dalam kajiannya. lihat Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Masal Yang Terlupakan 1965-1966*, diterjemahkan oleh Suaedy, Uchi Sabirin dan Syafiq, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), terutama bab II dan kajian Kerstin Beise, *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G30S*, (Yogyakarta: Ombak, 2004).

⁴⁸ Mengenai pemberontakan PKI 1926/1927 lihat Harry J. Benda and Ruth Mc. Vey, *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia : Key Document*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1960), Michael Williams, *Arit Dan Bulan Sabit, Pemberontakan Komunis Banten 1926*, diterjemahkan oleh Chandra Utama, (Yogyakarta: Syarikat, 2003), Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis di Silungkang 1927, Studi Gerakan Sosial Sumatera Barat*, (Yogyakarta: Syarikat, 2004), Abdul Muluk Nasution, *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, (Jakarta: Mutiara, 1979), Naswir Said, *Pemberontakan Silungkang Tahun 1927*, (Jakarta: PT. Panca, 1963) dan Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, diterjemahkan oleh Zahara Deliar Noer, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 301.

⁴⁹ Mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948 lihat beberapa karya yang mengupas tentang itu, Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Pesimpangan Kiri Jalan*, (Yogyakarta: Bentang, 1997), David Charles Anderson, *Peristiwa Madiun 1948 Kudeta Atau Konflik Internal Tentara ?*, diterjemahkan oleh Dwi Pratomo, Yulianto dan Lilik Suryo Nugrohojati, (Yogyakarta: Media Presindo, 2003).

⁵⁰ Seperti yang dikutip oleh Donald Wilhelm, *Indonesia Bangkit*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 50

⁵¹ PPPKI merupakan wadah federasi yang relatif dapat diterima oleh golongan kebangsaan maupun Islam. Soekarno dan Tjokroaminoto, dua pemimpin yang merepresentasikan kedua golongan tersebut terlibat aktif dalam pengorganisasiannya. Uraian mengenai PPPKI terdapat di banyak karya diantaranya, John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalisme Indonesia 1927-1934*, diterjemahkan oleh Zamakysari Dhofier, (Jakarta:

Orientasi ke arah kekuasaan memang belum ada saat itu, karena pemegang kekuasaan adalah pemerintah kolonial yang menjajah-dan ini efektif menjadikannya sebagai “pemersatu barisan” dan sekaligus “musuh bersama”. Namun setelah kemerdekaan orientasi kearah kekuasaan mulai muncul, persoalan-persoalan rumit yang menyangkut bagaimana kekuasaan dikelola, diatur dan dibagi sering muncul dalam bentuk pertentangan politik. Kekuasaan layaknya barang yang diperebutkan oleh partai-partai politik dan ini memicu pertentangan dan pengkotak-kotakan partai ke dalam ideologi maupun kepentingan golongan yang sempit. Mereka jadi terkungkung oleh kepentingan golongan dan sulit melihat persoalan bangsa dalam perspektif yang lebih besar, yakni kepentingan bersama.⁵³

Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan rapuhnya konsensus dan mudahnya pertentangan politik tersulut adalah dengan menyimak pada seringnya pergantian kabinet terjadi. Dari dua belas kali kabinet di masa demokrasi liberal, bila mau dirata-ratakan usianya maka setiap kabinet memerintah hanyalah delapan bulan saja. Kalau kemudian dihitung lebih menyeluruh lagi, dari dua puluh lima kabinet yang pernah memerintah selama Indonesia merdeka maka hanya tujuh kabinet yang berhasil memerintah selama dua belas sampai dua puluh tiga bulan. Dari jumlah tersebut ada dua belas kabinet yang berusia antara enam sampai sebelas bulan, dan enam kabinet diantaranya hanya bertahan antara satu hingga empat bulan.⁵⁴

Disintegrasi di kalangan elit juga semakin mengemuka manakala kabinet yang memerintah dikarenakan satu dan lain hal lantas wibawanya amat tergantung dengan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya, terutama Presiden Soekarno dan Angkatan Bersenjata. Presiden Soekarno sendiri juga terkadang terlalu cepat dalam menarik dukungan yang diberikannya pada kabinet, hingga membuat pemerintahan jatuh. Jatuhnya kabinet Natsir dalam bulan Maret 1951 sebagian dipicu oleh pertentangan Natsir dengan Soekarno dalam memberikan penilaian bagaimana cara penyelesaian pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia.⁵⁵

Demikian pula dengan kejatuhan kabinet Wilopo juga dipicu oleh pertikaian di kalangan elit. Persoalan yang paling mengemuka saat itu adalah ketika kabinet dihadapkan pada satu persoalan yang ada sejak beberapa tahun sebelumnya, terkait dengan bagaimana kekuatan Angkatan Bersenjata dibentuk dengan mengedepankan aspek profesionalisme. Menteri Pertahanan kemudian mengadakan kebijakan untuk merasionalisasi kesatuan-

LP3ES, 1983), hal. 5, AK. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hal. 84, Frank Dhont, *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*, (Yogyakarta: UGM, 2005), hal. 46, Bob Hering, *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka*, diterjemahkan oleh Harsono Sutejo, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hal. 161

⁵² Mengenai Kongres Al Islam dan peranannya dalam mewadahi aspirasi umat Islam Hindia, lihat Wardini Akhmad, *Kongres Al Islam 1922-1941, Satu Telaah Tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia Dalam Perkembangan Pergerakan Nasional*. Disertasi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1989.

⁵³ Alfian sebagaimana dikutip oleh Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 113.

⁵⁴ Arbi Sanit, *op. cit.*, hal. 1

⁵⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), p. 234-236.

kesatuan militer yang dirasakan tidak diperlukan lagi, sebanyak ketika Indonesia masih dalam perjuangan di masa revolusi fisik dulu. Rasionalisasi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan yang serius, sebagian anggota Parlemen lantas mempertanyakan kebijakan ini yang kemudian dibalas oleh Angkatan Bersenjata melalui pameran kekuatan dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “17 Oktober 1952”.

Angkatan Bersenjata dibawah kepemimpinan Nasution mengatakan Parlemen seharusnya tidak turut campur dalam persoalan internal Angkatan Perang, dan meminta kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen.⁵⁶ Persoalan ini memicu keretakan antara Masyumi dan PNI yang menjadi pilar kekuatan kabinet, apalagi kemudian berturut-turut persoalan baru datang yang penanganannya semakin memperuncing perbedaaan yang telah ada di kedua partai tersebut. Dua mosi dari PNI yaitu Mosi Rondonuwu yang menginginkan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia serta Mosi Sidik Kertapati mengenai penyelesaian kasus pertanahan di Tanjung Morawa ditanggapi berbeda oleh Masyumi. Alhasil ketidakharmonisan di kalangan pemerintah sendiri yang membuat kabinet ini macet, dan kemudian tanggal 3 Juni 1953 kabinet menyerahkan mandatnya pada Presiden.⁵⁷

Namun yang jauh lebih berbahaya dari sekedar pertikaian di kalangan elit adalah bagaimana pertikaian di level nasional tersebut, ternyata juga merembes ke tingkat massa di pedesaan yang membuat keteraturan komunal yang sebelumnya terjaga sering tercabik-cabik oleh konflik. Puncak dari pertikaian ideologis ini ada pada masa kampanye Pemilu 1955 yang demikian panjang, pasca disahkannya UU Pemilu. Pemilu yang diadakan untuk pertamakalinya sejak Indonesia merdeka ditanggapi dengan antusias oleh partai-partai politik, namun mereka lupa bahwa pelibatan massa ke dalam arena politik-lebih besar daripada di era revolusi, telah mengakibatkan massa di tingkat bawah sering bergolak. Baik elit apalagi massa tidak sadar kalau partisipasi politik yang berlebihan dan membuta telah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Geertz sebagai polarisasi religiusitas dan kebudayaan politik yang amat rentan untuk berkonflik. Varian *santri* dan *abangan* semakin sering berhadapan seperti yang dikemukakan Geertz.⁵⁸

⁵⁶ Mengenai jalannya peristiwa ini, sebab-sebab dan pengaruhnya bagi kabinet dan internal Angkatan Bersenjata sendiri, dapat dilihat dalam Ulf Sundhaussend, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal.

⁵⁷ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 148-149 dan Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, (Jakarta: Idayu, 1978), hal. 30-33.

⁵⁸ Geertz membagi masyarakat Jawa berdasarkan pemahaman ke-agamaannya ke dalam tiga tipologi *Santri*, *Abangan* dan *Priyayi*. Golongan *santri* adalah orang-orang yang memiliki orientasi keagamaan (Islam) yang cukup kuat, memilih partai-partai politik dan organisasi berbasis Islam dan menjalankan kesalehan-kesalehan Islam dengan taat. Golongan *abangan* merupakan kebalikan dari golongan *santri*. Golongan *abangan* adalah pemeluk Islam nominal, sekalipun mengaku Islam tetapi tidak menjalankan kesalehan ritual Islam dengan konsisten. Orientasi keagamaannya lebih bersifat sinkretis dengan pengaruh budaya Hindhu-Budha dan agama Jawi (Kejawen) yang cukup besar. Orientasi politiknya lebih ditujukan pada partai-partai sekuler (baik yang berbasis Marxisme-komunisme ataupun nasionalisme) dan hubungan dengan golongan *santri* tidak begitu harmonis dan sering terlibat konflik. Sedangkan yang ketiga adalah golongan *priyayi*. Dari thesis Geertz, golongan *priyayi* lah yang rentan untuk dikritik. *Priyayi* ini lebih banyak berhubungan dengan kelas sosial dalam masyarakat daripada varian keagamaan, karena itu oleh para pengkritiknya seperti yang dinyatakan Harsja Bachtiar, Heffner, Mc. Vey dan Syafi'i Anwar konsep trikotomik Geertz mencampur adukkan kedua hal tersebut. Mc. Vey sendiri lebih suka melihat pada akhirnya pemisahan utama terjadi antara agama Islam dan “agama Jawa” yang dianut oleh para

Saat kampanye PKI sering menyerang Masyumi dengan mengatakan bahwa perjuangan Islam yang dijalankan Masyumi sebenarnya bertolak belakang dengan kesepakatan negara nasional yang dibangun-posisi yang sebenarnya juga di dukung oleh PNI,⁵⁹ bahkan PKI mengecam lebih jauh dengan menuduh Masyumi bersimpati pada gerakan Darul Islam dan tidak mau bersikap tegas untuk mengecamnya. Masyumi yang diserang terpaksa membalasnya dengan mengatakan bahwa PKI amat diragukan komitmen kebangsaannya, toh selama ini PKI lebih menunjukkan dirinya sebagai “anak buah” Moskow yang berpahamkan internasionalisme. Masyumi juga mengungkit keterlibatan PKI dalam pemberontakan Madiun dan berusaha mengingatkannya dalam bentuk hari berkabung nasional dalam rangka memperingati peristiwa tersebut. Masyumi juga menekankan sikap anti agama yang melekat pada dontrin marxisme dengan mengutip perkataan Chou En Lai, Perdana Menteri China dalam Konfrensi Bandung yang mengatakan “*kami orang komunis, Atheis*”. Tokoh Masyumi Jawa Barat, Isa Anshari yang sikapnya dikenal keras terhadap komunisme, kemudian mendirikan Front Anti Komunis.⁶⁰

PKI sendiri kemudian mengajukan isu reformasi agraria kepada para pendukungnya demi memperoleh dukungan saat pemilu kelak, sesuatu yang ternyata berakibat fatal pada munculnya bentrok-bentrok fisik di kalangan masyarakat pedesaan Jawa. PKI tidak sabar dengan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) dengan melakukan apa yang dikatakan lawannya sebagai “aksi sepihak”. Tetapi PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) mengatakan bahwa apa

priyayi dan *abangan* “yang memasukkan pikiran pra Islam ke dalamnya serta mewakili kebudayaan desa dan kraton di Jawa pedalaman, dalam mempertahankan diri terhadap kekuasaan Islam yang telah melangkah maju dalam sejarah”. Dilihat dari sudut ini maka menurut Mc. Vey, sebenarnya masyarakat Jawa dibagi atas dua bukan tiga bagian kebudayaan, yaitu *santri* dan *abangan*. Geertz sendiri mengatakan *priyayi* merupakan para kaum bangsawan yang banyak diantaranya pegawai negeri dan orientasi politiknya lebih memilih partai-partai berbasis nasionalis yang direpresentasikan dengan PNI. Mengenai varian agama-agama di Jawa lihat, Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, diterjemahkan oleh Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989). Mengenai afiliasi politik *santri-abangan* dan perbedaan pandangan politik di sekitar masalah negara-masyarakat, dapat dibaca dalam Zaini Muchtarom, *Islam Di Jawa Dalam Perspektif Santri dan Abangan*, diterjemahkan oleh Sukarsi, (Jakarta: INIS, 1988).

Sedangkan kritik atas tipologi yang dibangun Geertz lihat karya; Harsja W Bachtiar “*The Religion of Java: A Comentary*”, Indonesian Journal of Cultural Studies, No. 1, vol. V (Januari 1973), hal. 85-114, Robert W. Heffner, Kemenangan Kultur Politik Santri, *Islamika*, No. 3 Januari 1994, hal 59, Ruth Mc. Vey “*Nationalism, Islam and Marxism: The Management of Ideological Conflict*” untuk pengantar karya Soekarno “Nationalism, Islam and Marxism” yang diterjemahkan oleh Karel H. Warouw dan Peter D. Weldon, (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1967), hal. 8-9, dan M. Syafi’i Anwar, “Negara dan Cendekiawan Muslim Indonesia Orde Baru”, dalam Saiful Muzani (ed), *Perkembangan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 123. Namun demikian oleh Donald K. Emmerson konsepsi Geertz ini dinyatakan cukup tangguh dalam memberikan penjelasan atas varian keagamaan masyarakat Jawa, sehingga menjadi *favorite topic* bagi para pengamat Indonesia. Lihat, *Indonesia’s Elite: Political Culture and CulturePolitics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1976), hal. 21. Bagi penulis walaupun dalam perkembangan sekarang ini teori Geertz tidak seluruhnya bisa menjelaskan fenomena-fenomena tadi, tapi dalam kasus diatas teori ini cukup mampu memberikan penjelasan atas konflik antara golongan nasionalis Islam dan nasioanalisis sekuler. Juga untuk bahan bandingan lihat Andrew Beatty, *Variasi Agama di Jawa, Suatu Pendekatan Antropologi*, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saefuddin, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) dan Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 310-427.

⁵⁹ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana, Masri Maria dan Parakitri T. Simbolon, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal. 15-16

⁶⁰ *Ibid*, hal. 20.

yang mereka lakukan sebenarnya merespon apa yang dilakukan para tuan tanah dan perusahaan-perusahaan perkebunan yang memprovokasi dan menghalangi pelaksanaan-pelaksanaan *land reform*.⁶¹ Dengan bertumpu pada BTI, massa pengikut PKI melakukan banyak penyerobotan tanah milik para tuan-tuan tanah yang memperkerjakan mereka sebagai buruhnya. Tuan-tuan tanah ini kebetulan banyak yang berasal dari kalangan muslim NU pemilik-pemilik pondok pesantren, atau tuan-tuan tanah bangsawan yang banyak berafiliasi ke PNI.

Pemilu yang ditunggu-tunggu sejak pertamakali diusahakan pelaksanaannya di tahun 1946, akhirnya terselenggara juga pada 4 April 1955. Banyak kejutan yang terjadi yang secara umum merupakan anomali terhadap dugaan potensi kekuatan partai-partai politik yang ada. Mungkin kejutan terbesar ada pada NU yang menaikkan kursinya di parlemen dari delapan menjadi empat puluh lima orang. Di kalangan elit politik prestasi ini cukup mencengangkan, tadinya mereka menduga bahwa kekuatan NU yang selama ini dibawah bayang-bayang Masyumi tidak akan sebesar itu. Namun para pengamat NU tidak kaget dengan prestasi ini. Mereka sadar akan potensi kaum tradisional ini, dan berpandangan bahwa di pedesaan Jawa yang berpenduduk padat kaum muslim tradisional yang selama berpuluh-puluh tahun afiliasi kultural religinya ke NU, justru menemukan salurannya ketika NU memutuskan untuk berpisah dari Masyumi dan mendirikan partainya sendiri di tahun 1952.⁶² Masyumi justru tidak disangka-sangka perolehan suaranya lebih kecil dari yang diprediksi, khususnya di Jawa Tengah dan Timur.⁶³ Suara Masyumi sebagian besar berasal dari kalangan santri di Sumatera dan Sulawesi.

Kekuatan PKI dan PNI di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga diluar dugaan. PKI yang diporak-porandakan pasca pemberontakan Madiun, ternyata dibawah kepemimpinan Aidit dapat kembali bangkit.⁶⁴ Bahkan partai yang berbasiskan para petani ini

⁶¹ Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto*, (Jakarta: Elsam, 2004), hal. 120

⁶² Mengenai keluarnya NU dari Masyumi dapat dilihat dalam beberapa karya Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makana*, diterjemahkan oleh Lesmana, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 45, B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, diterjemahkan oleh Saafroedin Bahar, (Jakarta: Grafitti, 1985), hal. 49, Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006), hal. 39, Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, *op. cit.*, hal. 81. Mahrus Irsyam menambahkan keluarnya NU dari Masyumi juga dipengaruhi oleh Soekarno yang mendukung sikap NU ini. Soekarno sendiri digambarkan Irsyam pasca retaknya hubungan Soekarno dengan Natsir membuat hubungannya dengan Masyumi juga merenggang, dan kemungkinan Soekarno turut “mengipas-ngipasi” NU untuk keluar dari Masyumi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Lihat Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984, 30-32.

⁶³ Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 83.

⁶⁴ Mengenai PKI dibawah kepemimpinan Aidit, terutama 1960-an dapat dibaca dalam Peter Edman, *Communism Ala Aidit, The Indonesian Communist Party Under DN. Aidit 1950-1965*, Centre Asian Studies, monograph series No. 23, James Cook University of North Queensland, Townsville, 1987. Anthony C.A. Dake, *In the Spirit of The Red Banteng : Indonesian Communism Between Moscow and Peking 1959-1965*, (The Hague: Mouton, 1973), Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia, 1951-1963*, (Berkeley, California, 1964), Arnold C. Brackman, *The Communist Collapse in Indonesia*, (New York: W.W. Norton, 1969), Brian May, *The Indonesian Tragedy* (Singapore: Graham Brash, 1978), Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideology and Politics, 1959-1965*, (Ithaca: Cornell University Press and Oxford University Press, 1974), Ulf Sundhaussend, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1994), Subhan SD, *Langkah Merah*, (Yogyakarta: Bentang, 1996). Sedangkan kemunculan Aidit sebagai pemimpin PKI dan keberhasilannya dalam membangun partai selama

menerapkan disiplin partai dan perekrutan massa besar-besaran melalui organisasi-organisasi *ouderbouw*-nya hingga akhirnya dapat menjadi partai terbesar keempat saat pemilu diumumkan. PNI juga sama, basis massanya di pedesaan Jawa yang berasal dari kelas menengah bawah/birokrat efektif mendulang suara hingga akhirnya dapat keluar menjadi pemenang.

Lebih mengherankan lagi PSI yang pengaruhnya selama sepuluh tahun Indonesia merdeka sebenarnya amatlah besar, bahkan beberapa kali tokoh-tokohnya malang melintang mengisi jabatan-jabatan penting dalam kabinet-nyatanya perolehan suaranya kecil sekali hanya 2%. Problem utama PSI hemat penulis terletak pada kurangnya PSI dalam mengembangkan basis massanya dan lebih mementingkan kualitas elit-elitnya. PSII juga mengalami hal yang sama, partai tertua ini yang tokoh-tokohnya banyak duduk sebagai elit-elit pemerintahan di beberapa kabinet, ternyata perolehan suaranya tidaklah mencapai 3%. Nampaknya kaderisasi yang teramat penting kurang berjalan, disamping basis massanya yang besar di zaman kolonial Belanda tidak terjaga. Perti, Partai Khatolik, Parkindo dan IPKI mendapat posisi di kelompok partai-partai kelas menengah yang suaranya antara 1 hingga 2%. Selebihnya seperti Partai Murba, dua partai PIR, Hazairin dan Wongsonegoro suaranya kecil sekali, tak lebih dari 1%. Perolehan masing-masing partai di pemilu parlemen 1955 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel I
Hasil Pemilihan Umum Parlemen

No	Partai	Jumlah suara sah	Persentase Suara sah	Jumlah Kursi	Kursi Dalam Parlemen Sementara
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,3	57	42
2	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	7.903.886	20,9	57	44
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,4	45	8
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	9.179.914	16,4	39	17
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,9	8	4
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.325	2,6	8	5
7	Partai Katholik	770.740	2,0	6	8
8	Partai Sosialis Indonesia	753.191	2,0	6	8
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,4	4	-
10	Perhimpunan Tarbiyah Indonesia (Perti)	483.014	1,3	4	1
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,6	2	13

10 tahun terakhir yang berujung pada kehancuran, dapat dilihat dalam kajian Jacques Leclerc, *Audit dan Partai Pada Tahun 1950*, Prisma No. 7, Juli 1982 Tahun XI.

12	Partai Buruh	224.167	0,6	2	13
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,6	2	-
14	Partai Rakyat Indonesia	206.261	0,5	2	-
15	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI)	200.419	0,2	2	-
16	Partai Murba	199.588	0,5	2	-
17	Badan Permusyawaratan Kewarga negaraan Indonesia (Baperki)	178.887	0,5	1	-
18	Partai Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,5	1	1
19	Gerinda	154.792	0,4	1	-
20	Persatuan Marhen (Permai)	149.287	0,4	1	-
21	Partai Persatuan Daya	146.054	0,4	1	-
22	Partai Indonesia Raya (PIR) Hazairin	114.644	0,3	1	18
23	Partai Persatuan Tharikat Islam (PPTI)	85.131	0,2	1	-
24	AKUI	81.454	0,2	1	-
25	Partai Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,2	1	-
26	Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,2	1	-
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,2	1	-
28	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk	53.305	0,1	1	-
29	Partai-Partai, organisasi-organisasi dan calon-calon perseorangan	1.022.433	2,7	-	46
	Total	37.758.299	100,0	257	233

Sumber: Tabel diambil dari Herbert Feith, *Pemilihan Umum Indonesia 1955*.

4.1.3. Periode Demokrasi Terpimpin

Pemilu yang diadakan untuk pertamakalinya, memang melambungkan harapan rakyat akan tumbuhnya pemerintahan yang lebih baik daripada periode sebelumnya dan kestabilan pemerintahanpun juga merupakan harapan rakyat banyak. Masyarakat seperti yang digambarkan oleh Feith antusias untuk mengikuti pesta demokrasi tersebut, tak ada rekayasa dan mungkin inilah pemilu paling demokratis yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Namun walaupun pemilu telah menyaring partai-partai tidak lagi sebanyak 40 buah⁶⁵ tetap saja ketidakstabilan politik berlanjut. Ketidakpuasan terhadap kabinet terus terjadi, kabinet Burhanuddin Harahap yang sebenarnya sukses mengantarkan pemilu tetap saja jatuh. Penggantinya kabinet Ali Sastroamidjojo II juga tak bertahan lama, hanya sampai Maret 1957 dan sesudah itu kemudian mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno.

Saat yang bersamaan pergolakan daerah juga banyak terjadi seperti dalam peristiwa pemberontakan Darul Islam,⁶⁶ baik di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa

⁶⁵ Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 137.

⁶⁶ Mengenai pemberontakan Darul Islam secara umum lihat Van Tjik, *op. cit.*. Untuk pemberontakan Darul Islam Kartosoewirjo Jawa Barat lihat Holk H. Dengel, *DarulIslam Dan Kartosoewirjo, Angan-Angan Yang Gagal*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), Karl Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, Kasus Darul*

Tengah serta PRRI dan Permesta.⁶⁷ Sementara itu pemberontakan-pemberontakan tersebut membuat Presiden Soekarno akhirnya pada 14 Maret 1957 memberlakukan negara dalam keadaan darurat atau SOB (*Staat Oorlog en Belleg*)⁶⁸ yang dengan UU tersebut militer (AD) memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dinilai dapat menstabilkan keadaan, sejak itulah posisi militer (AD) dalam masa Demokrasi Terpimpin menjadi penting.⁶⁹

Kekecewaan atas masa demokrasi parlementer dengan seluruh praktek dan akibat yang ditimbulkannya dengan cepat menyebar ke banyak kalangan. Dalam hal ini Soekarno adalah orang yang paling menunjukkan sikap resistensinya terhadap gagasan demokrasi Barat. Soekarno selalu mengaitkan lembaga-lembaga parlementer Barat dengan kapitalisme dan imperialisme, seperti yang dikemukakannya di kemudian hari “*kami melihat praktek kegiatan kapitalisme dan demokrasi Barat melalui Belanda. Kami tidak ingin mempertahankan sistem itu*”. Sebagai klimaksnya dalam satu pertemuan dengan kalangan pemuda dari berbagai partai politik, Soekarno mulai “mengkampanyekan” penguburan partai-partai. Ia mengatakan :

“...Ada penyakit yang kadang-kadang bahkan lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan! Engkau bertanya, penyakit apakah itu ? Itulah penyakit kepartaian, saudara-saudara! Ya, aku akan terus terang: itu penyakit kepartaian. Pada bulan November 1945-baiklah kita terus terang, kita telah membuat kesalahan besar. Kita menganjur-anjurkan pembentukan partai-partai, partai-partai. Itulah salah satu kesalahan pada bulan November 1945. Sekarang kita menanggung akibat-akibatnya.

Islam Jawa Barat, (Jakarta: Grafiti, 1990). Untuk Darul Islam Daud Bereuh Aceh lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Grafiti, 1990). Untuk pemberontakan Darul Islam Kahar Muzakkar Sulawesi Selatan lihat Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi Ke DI/TII*, (Jakarta: Grafiti, 1989).

⁶⁷ Mengenai pemberontakan PRRI lihat Yusril Ihza Mahendra, *Prolog PRRI dan Keterlibatan Natsir-Syarifuddin*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan dan Penerapan Ilmu Ekonomi dan Kemasyarakatan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1986), Suswanta, *Keberanian Untuk Takut, Tiga Tokoh Masyumi Dalam Drama PRRI*, (Yogyakarta: Avyroz: tt). Mengenai pemberontakan Permesta lihat Barbara Sillars Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Grafiti, 1989), Phill M. Sulu, *Permesta Jejak-Jejak Pengembaraan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997). Sedangkan karya-karya yang membahas kedua pemberontakan tersebut lihat Audrey Kahin and George Mc. Turnan Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, (New York: The New Press, 1995) dan R. Z. Leirissa, *PRRI-Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Grafiti, 1991).

⁶⁸ Mengeni penerapan SOB itu sendiri lihat disertasi Hariyono yang sudah dipublikasikan *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, (Jakarta: Pensil 324, 2008).

⁶⁹ “Keadaan Darurat Perang” didasarkan atas statute Hindia Belanda dahulu, yaitu “*Regeling op den staat van Oorlog en Beleg*” atau yang lazimnya disingkat SOB. Pasal 37 memeberikan keleluasaan pada militer dalam keadaan darurat perang untuk mengambil segala tindakan yang ditujukan untuk menstabilkan negara. Lihat Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, (Ithaca New York: Cornell Modern Indonesian Project, Monograph Series, 1966), p. 15-16. Lihat juga Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, diterjemahkan oleh Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 224, Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), hal. 101, Todiuran Dydo, *Pergolakan Politik Tentara, Sebelum dan Sesudah G 30S/PKI*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1990), hal. 56-57.

Lihatlah keadaan kita! Selain penyakit kesukuan dan kesetiaan kedaerahan, kita terkena penyakit kepartaian yang, sayang sekali, sayang sekali, menyebabkan kita selalu cakar-cakaran satu sama lain.

Impianku pada saat aku berpidato di hadapan saudara-saudara sekarang ini adalah *lha mbok ya*, pemimpin-pemimpin dari pada partai-partai ini berjumpa satu sama lain, mengadakan musyawarah satu sama lain dan lantas mengambil keputusan satu sama lain; Marilah kita menguburkan semua partai !!!.”

Dua hari kemudian dalam satu pidatonya untuk pertamakalinya Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai suatu sistem baru, yang kelak dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Memang Soekarno mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi seorang diktator, namun ia mengatakan pentingnya gagasan Demokrasi Terpimpin tersebut :

“Demokrasi yang saya dambakan untuk Indonesia bukanlah demokrasi liberal seperti yang terdapat di Eropa Barat. Tidak! Apa yang saya inginkan untuk Indonesia adalah suatu Demokrasi Terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan. Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, sesuatu yang dipimpin tetapi tetap demokrasi...
Dengan demokrasi kita mengalami kemacetan total. Itu tidak sehat; harus dirombak sama sekali...”

Dengan menyinggung akan kebobrokan sistem multi partai yang diterapkan, Soekarno mengemukakan bahwa tak seorang pun :

“Dapat membenarkan adanya empat puluh partai di negara kita. Engkau tidak dapat membenarkannya, engkau tidak dapat membenarkannya...
Kalau seseorang hendak mengurangi jumlah partai, partai mana yang harus dikubur ? Partai yang satu akan berkata : mengapa saya harus dikubur ? mengapa bukan yang lain.

Itu logis, itu logis. Tidak ada satu partai ingin dikubur sedang yang lain dibiarkan. Engkau tidak dapat bertindak demikian. Itulah sebabnya saya mengusulkan supaya kita menguburkan mereka bersama-sama, tanpa pilih kasih. Marilah kita kubur mereka!⁷⁰

Satu tahun kemudian (1957) Soekarno kemudian melangkah lebih jelas lagi ketika ia mengecam demokrasi liberal yang menurutnya sebagai biang keladi rusaknya sistem pemerintahan yang dibangun. Ia mengatakan :

“Di dalam sejarah Republik Indonesia, yang sekarang sudah berumur sebelas tahun, kita tidak pernah mempunyai pemerintahan yang stabil.

Bangsa Indonesia telah dipesonasi oleh demokrasi dan ingin melaksanakan demokrasi dalam praktek...Tetapi pengalaman selama sebelas tahun ini

⁷⁰ Soekarno sebagaimana yang dikutip oleh Donald Wildhlem, *op. cit.*, hal. 32-33.

telah meyakinkan saya bahwa demokrasi yang kita anut, demokrasi yang kita pergunakan, adalah demokrasi yang tidak serasi dengan jiwa bangsa Indonesia...Dan karena demokrasi ini adalah demokrasi impor, bukan demokrasi Indonesia, bukan demokrasi yang sesuai dengan semangat kita, kita mengalami segala macam eksekusi yang diakibatkan oleh pelaksanaan gagasan impor maupun segala macam eksekusi yang diakibatkan oleh pelaksanaan demokrasi yang tidak sesuai dengan kepribadian kita”.

Selanjutnya Soekarno memberikan penilaian bahwa kelemahan sistem demokrasi liberal yang dikembangkan selama ini adalah dalam hal memaknai oposisi. Oposisi ditafsirkan dengan cara yang tidak sesuai dengan semangat ke-Indonesia kita. Ia mengatakan :

“Demokrasi Indonesia, yang banyak disalahartikan di luar negara kita, dilaksanakan secara konsensus, bukan dengan menunjukkan tangan. Kita tidak dapat lagi menerima demokrasi barat dengan pengambilan suara terbanyak, dimana 51 persen menang dan 49 persen kalah dengan rasa dongkol. Seperti kita alami, dengan partai politik kita, pihak yang tidak puas membalas dengan merongrong yang lain. Suatu cara yang ampuh untuk menghambat pertumbuhan sebuah negara yang baru terbentuk”.⁷¹

Konsep yang dikemukakan Soekarno merujuk pada apa yang dikemukakannya di pidato 1 Juni 1945, yaitu gotong royong. Ia mengemukakan ada dua tawaran yang menurutnya merupakan jalan keluar bagi penyelesaian dari merebaknya sektarian golongan dan partai, yaitu pertama Kabinet Gotong Royong dan kedua ada pada apa yang disebutnya sebagai Dewan Nasional. Kabinet Gotong Royong merupakan kabinet yang tidak hanya diisi oleh satu dua partai saja, namun juga harus menyertakan seluruh partai-partai yang ada tanpa terkecuali. Dalam konsepnya ini Soekarno mengatakan kabinet yang ada hendaknya juga menampung PKI sebagaimana kuatnya partai ini dalam hasil pemilu 1955. Bila ini dilakukan maka pemerintahan yang ada adalah Kabinet Gotong Royong, tanpa ada friksi, stabilitas terjaga dan tidak ada lagi kabinet jatuh dengan mudahnya.

Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan Dewan Nasional yang disusun berdasarkan atas perwakilan seluruh golongan-golongan fungsional yang ada. Golongan fungsional merupakan pencerminan dari golongan-golongan yang ada di masyarakat, umpamanya golongan buruh, tani, cendekiawan, guru, tokoh-tokoh agama dari semua agama, pemuda, wanita, Angkatan Bersenjata dan sebagainya, yang “*insya Allah*” demikian kata Soekarno “*saya sendiri yang akan memimpin*”.⁷² Hemat penulis Dewan Nasional dalam pandangan Soekarno ini, haruslah dilihat dari sudut kegagalan partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak stabilnya pemerintahan yang dibangun. Dewan Nasional sebenarnya merupakan representasi dari keinginan untuk menciptakan institusi baru yang merupakan penyerap, penampung dan penyalur aspirasi rakyat, padahal ini sudah ada pada parlemen. Namun Soekarno yang melihat “rusaknya

⁷¹ *ibid.*, hal. 33-34.

⁷² *Ibid.*, hal. 34

mentalitas” partai-partai yang ada, kemudian tergoda untuk memikirkan institusi lain di luar parlemen, dan itu ada pada Dewan Nasional.⁷³

Kedua gagasan tersebut harus dilihat dalam konteks skeptisnya Soekarno terhadap partai politik, dan ini seperti yang nanti kita lihat di tahun-tahun berikutnya-peran partai politik makin lama makin berkurang. Tiga tahun kemudian, Februari 1959 kekuatan partai politik akhirnya dilucuti. Ia mengajurkan agar bangsa Indonesia kembali saja ke UUD 1945 sebagai landasan bagi Demokrasi Terpimpin-nya. Selanjutnya ia meminta pada seluruh rakyat agar Konstituante yang selama tiga tahun bersidang namun tidak dapat juga menyelesaikan UUD yang baru, untuk segera bubar saja dan kembali mempergunakan UUD 1945. Ketika Konstituante menolak memberikan dukungan bagi gagasan ini, Soekarno kemudian pada 5 Juli mengumumkan pembubarannya. Ia mengatakan tindakan itu diambil karena “*kegagalan Dewan Konstituante demi kepentingan negara dan bangsa, dan untuk menyelamatkan revolusi*”.⁷⁴ Legge menilai bahwa tindakan membubarkan Konstituante adalah tindakan sewenang-wenang, namun mungkin karena rakyat juga lelah dengan apa yang ditampilkan pada ketidakstabilan demokrasi liberal, membuat rakyat tak banyak mengkritik.⁷⁵

Pasca diberlakukannya Demokrasi Terpimpin kabinet Parlemerter beralih menjadi kabinet Presidensial, tidak seperti masa sebelumnya dimana kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang mengepalai pemerintahan. Namun sekarang pemerintahan langsung dipegang oleh Soekarno sendiri selaku Presiden (Kepala Negara) yang merangkap Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan). Peran partai politik dan Parlemen lambat laun beralih ke Soekarno seiring upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangannya. Para pimpinan lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR GR dan DPA yang menurut konstitusi sebenarnya sejajar dengan Presiden, namun oleh Soekarno diposisikan sebagai menteri.⁷⁶ Kabinet yang berasal dari masa demokrasi liberal dirombak, dan syarat bagi keikutsertaan partai politik di era Demokrasi Terpimpin ini adalah kesetiiaannya pada ajaran dan praktek politik yang di disain Soekarno.

Soekarno memberi tafsir monolitik atas Demokrasi Terpimpin, ideologisasi revolusioner terus dipompakan pada masyarakat. Jargon berupa “revolusi belum selesai” dan Indonesia tengah memasuki tahap akhir dari penyelesaian revolusinya-dengan melakukan penentangan terhadap semua kekuatan neo kolonialisme yang ada, terus dipompakan Soekarno. Pidatonya pada peringatan 17 Agustus 1959 “*Penemuan Kembali Revolusi*

⁷³ Model representasi yang sama dengan model yang ada pada Dewan Nasional sebenarnya juga dipraktekkan oleh pemerintah Orde Baru dalam baju yang berbeda. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru memiliki dua sayap, satu sayap partai di tubuh parlemen yaitu DPR dan satu lagi sayap golongan-golongan fungsional dan daerah yang dalam persepsi Orde Baru golongan fungsional tersebut adalah golongan masyarakat yang sepenuhnya tidak dapat terwakili oleh partai-partai politik. Untuk menampung aspirasi mereka maka MPR lah yang kemudian berfungsi sebagai lembaga penyalur aspirasi mereka.

⁷⁴ Donald Wilhelm, *op. cit.*, hal. 37.

⁷⁵ Legge sebagaimana yang dikutip oleh Donald Wilhelm, *op. cit.*, hal. 37.

⁷⁶ Lihat Bibit Suprpto, *op. cit.*

Kita” (*The Rediscovery of our Revolution*) yang lebih dikenal sebagai “*Manifesto Politik*” kemudian dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).⁷⁷

Ajarannya yang lain berupa Panca Azimat Revolusi “USDEK” bersama dengan NASAKOM menjadi elemen terpenting dari indoktrinasi negara ke seluruh masyarakat. USDEK merupakan akronim dari (U) Undang-Undang Dasar 1945, (S) Sosialisme, (D) Demokrasi Terpimpin, (E) Ekonomi berdikari dan (K) Kepribadian Indonesia, sedangkan NASAKOM adalah buah dari pikirannya yang paling orisinal yang berasal dari tiga dekade sebelumnya “*Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*”. NASAKOM menurutnya adalah jalan keluar untuk mentradisikan gotong royong dalam kehidupan berbangsa. NASAKOM sendiri menurut Soekarno merujuk pada *living reality* bangsa, bahwa penggolongan masyarakat Indonesia dapat dikembalikan kepada tiga golongan besar yaitu kaum nasionalis, kaum marxis dan umat Islam. Untuk itu semua institusi sosial politik yang ada di masyarakat diharapkan dapat diisi oleh ketiga unsur tersebut dengan melakukan “NASAKOMisasi”.

Semua kekuatan politik yang ada termasuk partai-partai politik utama seperti PNI dan NU ditekan untuk menerima gagasan Soekarno, atau menyesuaikan pandangannya dengan seruan Soekarno agar dapat eksis.⁷⁸ Masyumi dan PSI, dua partai politik yang paling kritis terhadap gagasan Demokrasi Terpimpin terpojok dengan keikutsertaan para tokoh-tokohnya dalam pemberontakan PRRI. Bahkan Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo dan tokoh-tokoh lain dari dua partai tersebut hengkang dari Jakarta dan bergabung dengan para pemberontak, ketika mereka merasa diancam terus keselamatannya oleh aksi-aksi PKI.⁷⁹

Demokrasi Terpimpin bukannya tanpa tentangan, pemimpin Masyumi yang baru hasil Kongres Yogyakarta April 1959, Prawoto Mangkusamito meneruskan tradisi kritis Natsir. Ia menyatakan menolak dengan pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli yang menyatakan kembali ke UUD 1945, seharusnya Konstituante tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan perdebatan tentang dasar negara yang sebenarnya tinggal sedikit lagi diselesaikan. Prawoto mengatakan bahwa partainya menolak negara kekuasaan yang menurutnya merupakan tujuan dari Presiden Soekarno. Ia mengatakan mendukung negara konstitusional, bukan negara yang dibangun dengan mempergunakan azaz-azaz terpimpin yang sebenarnya bukanlah demokrasi.⁸⁰

Sama seperti Natsir dan Prawoto, Sjahrir juga menentang Demokrasi Terpimpin. Sejak awal Sjahrir yang berdiri paling depan bersama dengan Hatta dalam komitmennya dengan demokrasi konstitusional, curiga bahwa langkah Soekarno membawa Demokrasi Terpimpin akan berakhir ke negara otoriterian. Tetapi sayangnya PSI bukanlah apa-apa ditinjau dari kekuatan politik, dan untuk mencegahnya seperti yang ditulis Brackman “hanya Natsir yang memiliki organisasi massa (Masyumi) dalam kedudukan

⁷⁷ Lihat pidato Soekarno, *Manifesto Politik Republik Indonesia*, (Surabaya: CV. Dirgahayu Press, 1959)

⁷⁸ Herbert Feith “Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 ; Suatu Pengantar” dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 201-208.

⁷⁹ Rudolf Mrazek, *op. cit.*, hal. 787.

⁸⁰ Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, *op. cit.*, hal. 381-382.

menentang”.⁸¹ Sjahrir juga menambahkan bahwa pada dasarnya Demokrasi Terpimpin “dapat ditelusuri kembali ke struktur hirarkis dan oligarkis dan dapat ditelusuri ke depan ke feodalisme baru”.⁸²

Diantara partai-partai yang ada, yang paling lihai dalam mengambil momen Demokrasi Terpimpin demi kepentingannya sendiri adalah PKI. PKI rupanya bisa mengambil hati Soekarno ketika ia butuh dukungan massa bagi agitasi akan pentingnya revolusi untuk diselesaikan. Dalam hal ini PKI di depan Soekarno berusaha menampilkan dirinya sebagai partai yang revolusioner, yang bila Presiden membutuhkan massa untuk mendukung tindakan-tindakannya, maka partai ini bisa memberikan jaminan bahwa mereka berada di belakangnya. Soekarno sendiri seperti yang kita ketahui, kurun waktu antara 1959 sampai tahun 1965 berkembang semakin revolusioner, gugatannya pada pengembalian Irian Barat menjadikan tensi politik dalam negeri semakin revolusioner.

Tidak berhenti disitu bersamaan dengan kampanye pembebasan Irian Barat, maka giliran politik luar negeri Indonesia yang bergerak semakin kencang ke kiri. Untuk keperluan perang melawan Belanda di Irian Barat, Soekarno yang sebelumnya ditolak Amerika Serikat ketika hendak membeli kapal-kapal perang, kemudian beralih ke Uni Sovyet. Dari Uni Sovyet ia memperoleh dukungan kapal-kapal perang tersebut. Setelah Irian Barat dapat direbut dan dikembalikan pada Ibu Pertiwi, kini datang persoalan baru. Malaysia setelah berkonsultasi dengan Inggris mengumumkan akan memproklamkan pendirian federasi Malaysia pada Agustus 1963.⁸³

Soekarno yang bila kita menyimak perjalanannya memang didedikasikan untuk melawan penindasan kolonialisme, merasa bahwa ini adalah proyek besar nekolim (neo kolonialisme) baru. Ia mengatakan tidak ingin di depan hidungnya (Indonesia) ada negara “boneka” Inggris, dan revolusi Indonesia yang belum selesai dalam menentang neo kolonialisme baru, tentu tidak ingin kehadiran negara boneka tersebut ada di dekatnya. Soekarno nampaknya juga terpengaruh dengan iklim perang dingin saat itu, Barat dengan negara-negara kutub Amerika Serikat-Inggris yang identik dengan imperialisme di satu pihak dengan Timur yang identik dengan Uni Sovyet sebagai kekuatan penentang kapitalisme di lain pihak. Soekarno sendiri dari hari ke hari memang menunjukkan semangat revolusionernya, dan seperti yang kita lihat ia memang dekat dengan kutub Timur.

Soekarno di setiap pertemuan melalui kekuatan orasinya berusaha membangkitkan emosi massa dengan slogan-slogan “revolusi belum selesai”, sesuatu yang dulu juga sering diucapkannya saat memimpin PNI di akhir 1920-an. Kondisi seperti ini cenderung memanasakan iklim politik Indonesia dan PKI yang jargon-jargonnya juga menentang kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme memposisikan dirinya sebagai sekutu loyal Soekarno. Namun Soekarno juga bukannya tak sadar dengan perkembangan ini, ia ingin

⁸¹ Rudolf Mrazek, *op. cit.*, hal. 780.

⁸² *Ibid.*, hal. 781.

⁸³ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri, Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hal. 95.

menundukan PKI dan memberikan spirit nasionalisme dalam muatan ideologi komunis yang dipegang partai ini. Soekarno ingin PKI tidak keluar batas, dan salah satu caranya adalah tetap menghadirkan kekuatan lain yang setanding dengan PKI dan ini ada pada AD.

AD sama seperti PKI adalah dua aktor terpenting dalam periode Demokrasi Terpimpin. Bagi Soekarno AD juga penting, selain sebagai penyeimbang PKI, AD juga semakin penting ketika politik dalam negeri Indonesia semakin memanas dengan terjadinya beberapa pemberontakan. AD menjadi topangan bila sewaktu-waktu Indonesia juga harus berperang dengan kekuatan-kekuatan nekolim yang ada, ancaman ke arah perang tersebut bukannya tidak ada, kasus Irian Barat dan Malaysia tentu ada dalam benak Soekarno dan karena itu ia butuh topangan militer.

PKI juga sadar bahwa perlindungan Soekarno baginya penting, bayangan terhadap kehancuran PKI pasca pemberontakan Madiun tentu tidak ingin mereka terima kembali. Karena itu secara matematis kekuatan PKI yang tidak ada “apa-apanya” bila dibandingkan dengan AD (bersama AL, AU dan Kepolisian tentunya) yang memonopoli alat-alat kekerasan, berusaha diterobos PKI dengan membujuk Soekarno untuk mempersenjatai satu juta orang dalam rangka persiapan konfrontasi dengan kekuatan nekolim lainnya, namun AD menolak keras rencana tersebut. Bagi Feith rivalitas AD dan PKI sebenarnya memang dipelihara oleh Soekarno sendiri, dan justru kekuatan Soekarno ada pada kemampuannya dalam memanipulasi kondisi tersebut. Kalau mau digambarkan, ketiganya seperti segitiga sama kaki, dimana Soekarno berdiri diatas keduanya sebagai penyeimbang, sedangkan AD dan PKI menjadi kaki-kakinya yang sejajar. Dalam Demokrasi Terpimpin ketiganya menjadi pemain utama, dan partai-partai politik lainnya menjadi figuran.⁸⁴

Setelah kembali ke UUD 1945, pukulan terakhir bagi keberadaan partai politik ada pada keinginan Soekarno untuk melakukan restrukturisasi kehidupan partai politik atau penyederhanaan partai politik. Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7/1959 yang berisi tentang pengaturan sistem kepartaian yang ada dalam rangka penyederhanaan partai politik. UU Pemilu memang tidak menggariskan adanya penyederhaan partai walaupun saat pemilu nyatanya memang hanya beberapa partai saja yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena itu partai yang berjumlah 40 tersebut diusahakan Soekarno untuk disederhanakan. Penpres No. 7/1959 menyebut sebuah partai politik haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. “Dalam Anggaran Dasar organisasi ...dicantumkan dengan tegas bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan UUD Negara RI yang memuat dasar-dasar Negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan, Peri Kemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertujuan untuk membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia serta berdasarkan program kerjanya masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, yang telah dinyatakan menjadi haluan negara”.

⁸⁴ Lihat Herbert Feith, *Soekarno dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001),

2. “Organisasi-organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partainya itu”, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
3. “Menggunakan jalan-jalan damai dan demokratis, untuk “memperjuangkan tujuannya”.
4. “Memiliki cabang-cabang yang tersebar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dari jumlah cabang-cabang itu di seluruh wilayah Indonesia”.

Selain itu dalam pasal 8 Penpres tersebut disebutkan bahwa “*pemerintah berwenang untuk mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata usaha dan kekayaan partai-partai*”.⁸⁵ Penpres ini nampaknya lebih ditujukan atas Masyumi dan PSI, dua partai yang paling menentang Demokrasi Terpimpin, apalagi dalam pasal 9 disebutkan bahwa Presiden setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung, dapat melarang dan membubarkan partai yang “*sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu*”.⁸⁶

Seperti telah disebut di atas tokoh-tokoh terpenting dari Masyumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan yang dimaksud, dan Masyumi sendiri tidak pernah secara resmi mengancam tindakan para tokoh-tokohnya ini. Masyumi dan PSI akhirnya melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 200 dan 201 dibubarkan. Pemberitahuan pembubaran kedua partai ini diterima oleh keduanya pada tanggal 17 Agustus 1960. Dalam surat yang ditulis oleh Direktur Kabinet Presiden yang ditujukan pada Masyumi dikatakan bahwa “*Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami*” untuk menyampaikan surat keputusan ini. Dalam jangka waktu 30 hari ke depan pimpinan partai Masyumi harus membubarkan partainya, atau kalau tidak maka pemerintah yang akan membubarkannya seraya menyatakan bahwa partai ini merupakan partai terlarang.⁸⁷

Dalam kaitannya dengan penyederhanaan partai dan meminimalisir gerakan-gerakan anti Demokrasi Terpimpin, maka pemerintah mengeluarkan pula Kepres No. 128 dan 129 tahun 1961. Kepres tersebut hanya mengakui adanya delapan partai politik yaitu, PNI, NU, PKI, Partai Khatolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Kepres No. 129 menolak pengakuan sebagai partai terhadap PSII Abikoesno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo. Disamping itu melalui Kepres No. 440 diakui pula sebagai partai politik yaitu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).⁸⁸ Partai-partai lain yang tidak lolos dalam penyaringan, dibubarkan. Tindakan Soekarno yang memandulkan peran partai politik, jelas terlihat saat sebelumnya pada Maret 1960 Presiden membubarkan Parlemen hasil bentukan pemilu 1955 dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) yang anggotanya diangkat oleh Presiden.

⁸⁵ Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, *op. cit.*, hal. 383.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 384.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 386.

⁸⁸ Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 150.

Tindakan otoriterian Soekarno oleh para pengkritiknya dikatakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, bahkan demokrasi yang ada telah hilang dan yang tinggal hanya terpimpinnya saja. Untuk menutup paper ini ada baiknya penilaian Penders dibawah menarik disimak dalam melihat praktek “Demokrasi Terpimpin” :

“Sebagian terbesar bangsa Indonesia menyambut baik kegagalan besar demokrasi liberal dan percaya bahwa Soekarno memiliki kunci wasiat yang akhirnya akan membuka pintu bagi zaman kemakmuran dan kebahagiaan yang telah lama dijanjikan. Tetapi baik Soekarno maupun demokrasi terpimpinnya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dasar yaitu perpecahan politik dan ideologis dan semakin memburuknya keadaan ekonomi. Soekarno berhasil menciptakan stabilitas politik semu di negaranya dengan memaksa golongan-golongan politik tunduk pada pikiran-pikirannya, dan menyingkirkan mereka yang tak dapat menyetujuinya.

Tetapi demokrasi terpimpin ternyata tidak mampu meniadakan pengkotakan di bidang politik dan ideologi yang *inherent* di negeri ini: satu-satunya yang dilakukan oleh sistem pemerintahan yang baru adalah memperjelas masalah dengan menyederhanakannya menjadi sebuah pertarungan kekuatan antara tentara dan kaum komunis. Soekarno sama sekali tidak menjadi diktaktor penuh dan kekuasaannya tergantung pada keberhasilannya memanipulasi pertarungan keduanya”.⁸⁹

4.2. Pengebirian Partai Politik dan Pengekangan Demokrasi

Runtuhnya Orde Lama yang kemudian digantikan Orde Baru telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Dengan mengusung tema pentingnya pembaharuan politik sebagai koreksi total atas kekeliruan Orde Lama, Orde Baru menginginkan perubahan mendasar dalam penataan pembangunan nasional baik ekonomi maupun politik. Orde Baru tampil dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekwen.

Kekeliruan yang dilakukan Orde Lama tampak dalam berbagai kesemrautan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Di bidang politik jumlah partai yang besar telah merepotkan pemerintah dalam mengadakan penataan sistem kepartaian yang kemudian berakibat juga pada sistem pemerintahan. Keberadaan partai-partai selalu saja diiringi dengan pertikaian politik, dan pemerintahan yang terbangun pun menjadi rapuh. Kabinet yang ada selalu saja merupakan koalisi diantara partai-partai dan ini seringkali menyulitkan ketika kebutuhan profesionalitas berhadapan dengan kepentingan politik yang lebih besar. Dari sejak awal pembentukan pemerintahan tarik menarik kepentingan untuk memperebutkan kursi departemen selalu saja terjadi dan tidak jarang menimbulkan konflik diantara sesama koalisi pembentuk pemerintahan. Ketika pemerintahan sudah berjalan pun ancaman perpecahan koalisi juga mengintai, partai-partai pendukung pemerintah bisa saja menarik menteri-menterinya hingga kabinet jatuh dan harus

⁸⁹ Penders sebagaimana yang dikutip oleh Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 143-144.

menyerahkan mandatnya pada Presiden. Begitu rapuhnya pemerintahan sampai-sampai dalam kurun waktu dua belas tahun Indonesia merdeka ada sebanyak dua belas kali pergantian kabinet.⁹⁰

Kesemrautan politik tersebut bertambah saat Soekarno tampil secara penuh di puncak kekuasaan. Soekarno yang resah dengan jatuh bangunnya pemerintahan tergoda untuk menstabilkan pemerintahan dengan cara-cara otoriter. Seperti yang disinggung Feith saat terakhir kekuasaannya Soekarno begitu bersemangat dalam menjalankan gagasannya bahkan cenderung memaksakan kehendaknya. Untuk berpartisipasi dalam politik secara resmi, orang haruslah menyesuaikan pandangan politiknya dengan gagasan dan slogan-slogan pemerintah.⁹¹

Saat bersamaan posisi AD dan PKI juga semakin menguat seiring dengan makin kondusifnya iklim politik bagi mereka. Posisi politik AD makin berkembang bersamaan dengan makin pentingnya posisi mereka pasca terjadinya berbagai pemberontakan di beberapa daerah, seperti Darul Islam⁹² serta PRRI dan Permesta.⁹³ Kuatnya posisi AD terasa saat pemerintahan Ali Sastroamidjojo yang didukung oleh Presiden Soekarno, pada 14 Maret 1957 memberlakukan negara dalam keadaan darurat atau SOB (*Staat Oorlog en Belleg*),⁹⁴ yang dengan UU tersebut AD memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dinilai dapat menstabilkan keadaan.⁹⁵ Demikian pula posisi PKI sendiri makin kuat bersamaan dengan garis politik Indonesia yang makin condong ke kiri. Soekarno rupanya membutuhkan dukungan massa PKI ketika harus melakukan

⁹⁰ Lihat Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

⁹¹ Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, diterjemahkan oleh Min Yubhar, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal.

⁹² Mengenai pemberontakan Darul Islam secara umum lihat Carl Van Tjik, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1993). Untuk pemberontakan Darul Islam Kartosoewirjo Jawa Barat lihat Holk H. Dengel, *DarulIslam Dan Kartosoewirjo, Angan-Angan Yang Gagal*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), Karl Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, (Jakarta: Grafiti, 1990). Untuk Darul Islam Daud Bereuh Aceh lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Grafiti, 1990). Untuk pemberontakan Darul Islam Kahar Muzakkar Sulawesi Selatan lihat Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi Ke DI/TII*, (Jakarta: Grafiti, 1989).

⁹³ Mengenai pemberontakan PRRI lihat Yusril Ihza Mahendra, *Prolog PRRI dan Keterlibatan Natsir-Syarifuddin*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan dan Penerapan Ilmu Ekonomi dan Kemasyarakatan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1986), Suswanta, *Keberanian Untuk Takut, Tiga Tokoh Masyumi Dalam Drama PRRI*, (Yogyakarta: Avyroz: tt). Mengenai pemberontakan Permesta lihat Barbara Sillars Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Grafiti, 1989), Phill M. Sulu, *Permesta Jejak-Jejak Pengembaraan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997). Sedangkan karya-karya yang membahas kedua pemberontakan tersebut lihat Audrey Kahin and George Mc. Turnan Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, (New York: The New Press, 1995) dan R. Z. Leirissa, *PRRI-Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Grafiti, 1991).

⁹⁴ Mengeni penerapan SOB itu sendiri lihat disertasi Hariyono yang sudah dipublikasikan *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, (Jakarta: Pensil 324, 2008).

⁹⁵ “Keadaan Darurat Perang” didasarkan atas statute Hindia Belanda dahulu, yaitu “*Regeling op den staat van Oorlog en Beleg*” atau yang lazimnya disingkat SOB. Pasal 37 memeberikan keleluasaan pada militer dalam keadaan darurat perang untuk mengambil segala tindakan yang ditujukan untuk menstabilkan negara. Lihat Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, (Ithaca New York: Cornell Modern Indonesian Project, Monograph Series, 1966), p. 15-16. Lihat juga Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, diterjemahkan oleh Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 224, Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), hal. 101, Todiuran Dydo, *Pergolakan Politik Tentara, Sebelum dan Sesudah G 30S/PKI*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1990), hal. 56-57.

konfrontasi dengan kekuatan-kekuatan Nekolim (neokolonialisme), dan karena itu di bawah perlindungan Soekarno tanpa terasa PKI semakin membesar pengaruhnya. Sementara itu dengan rapuhnya stabilitas politik, di bidang ekonomi ancaman kehancuranpun semakin mengintai seiring dengan menjamnya inflasi dan harga-harga melambung dengan cepat.⁹⁶

Pasca G30S/PKI Orde Baru yang menggantikan Orde Lama belajar dari kegagalan pemerintahan sebelumnya. Penguasa yang baru sangat berhati-hati dalam mengembangkan partisipasi masyarakat. Bagi Orde Baru yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian negara dan seluruh potensi memang ditujukan ke sana. Sedangkan politik yang pada masa Orde Lama terlihat hingar bingar, maka Orde Baru berusaha menjauhkannya dari rakyat. Ali Moertopo, seorang arsitek format politik Orde Baru dan mantan penasehat khusus Soeharto dalam bidang intelijen yang mengepalai unit Operasi Khusus (Opsus) di dalam bukunya “*Strategi Politik Nasional*” menyatakan bahwa strategi politik Orde Baru di tempuh melalui empat tahapan: *Pertama*, penghancuran PKI sampai ke basis massanya yang terkecil. *Kedua*, konsolidasi pemerintahan dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. *Ketiga*, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional. *Keempat*, menciptakan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. Sidang Umum MPRS V tanggal 27 Maret 1968 selain mengangkat Soeharto sebagai Presiden penuh juga menetapkan tugas pokok Kabinet pembangunan yang dikenal dengan Panca Krida, yang dengan dasar ini pulalah Pelita (pembangunan Lima Tahun) kemudian dirancang dan mulai dilaksanakan pada bulan April 1969.⁹⁷

Perdebatan klasik mengenai mana yang harus didahulukan antara pembangunan politik atau pembangunan ekonomi, di masa awal Orde Baru kembali mencuat. Kedua-duanya, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah dua hal yang tak bisa dipisah-pisahkan dan merupakan dua elemen pokok yang harus selalu ada dalam pembangunan nasional.⁹⁸ Hanya saja dilema seperti yang diperlihatkan beberapa negara, seperti Pakistan dan Korea Selatan, pilihan untuk mengedepankan salah satunya dalam hal ini, ekonomi, terkadang menggoda rezim-rezim militer yang sedang berkuasa untuk mengekang kehidupan politik yang demokratis. Ini dilakukan semata-mata untuk mengejar pembangunan ekonomi yang oleh mereka, thesis kestabilan politik sebagai pra syarat pembangunan ekonomi begitu dipercayai. Demi pembangunan yang selama masa Orde Baru telah dijadikan ideologinya, “Pembangunanisme”, maka restrukturisasi kehidupan politik menjadi wajib dilakukan. Restrukturisasi format politik dijalankan dalam rangka menguatkan posisi pemerintah, memberikan legitimasi padanya, dan menciptakan kestabilan politik.

Dalam hal ini Pemilihan Umum menjadi fokus utama mengingat wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen tidaklah terpilih atas dasar pemilu, namun penunjukan langsung

⁹⁶ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, diterjemahkan oleh M. Rusli Karim, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 47.

⁹⁷ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 14-17.

⁹⁸ Lihat Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 3-22

Presiden Soekarno. Orde Baru yang mengklaim dirinya sebagai thesis yang berbanding terbalik dengan Orde Lama, mau tidak mau juga harus menyelenggarakan pemilu tersebut. Hanya saja yang jadi persoalan adalah belum adanya Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang itu dan baru pada tahun 1971, pemilu pertama di era Orde Baru berhasil diselenggarakan. Lamanya pembahasan UU Pemilu⁹⁹ dan waktu penyelenggaraan pemilu membuat sebagian orang bercuriga ada sesuatu dibelakang penundaan pemilu tersebut, terdengar desas-desus ini dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Golkar. Bagi Orde Baru menguatkan “mesin politik” ini adalah taruhan segala-galanya, karena itu begitu pemilu diselenggarakan maka tidak ada pilihan lain Golkar harus menang untuk mengamankan dan memberi legitimasi memerintah bagi Orde Baru.

Untuk mendukung rencana tersebut sejumlah strategi sudah disiapkan, sejumlah aturan yang menyangkut Pemilu serta susunan dan keanggotaan Parlemen mulai digodok. UU Pemilu disahkan tahun 1969, pemerintah diuntungkan dengan adanya sejumlah orang yang dipilih dan ada juga yang diangkat di DPR/MPR. Hasil kompromi antara pemerintah dan seluruh partai-partai politik yang ada, dituangkan dalam Pasal 10 UU No. 16 Tahun 1969 yang menyatakan “Anggota DPR berjumlah sebanyak 460 orang, 360 orang dipilih melalui Pemilu dan 100 orang diangkat”. 100 orang yang diangkat tersebut 75 orang berasal dari ABRI sedangkan yang 25 lagi golongan fungsional non ABRI. Jadi, komposisi tersebut semakin menguatkan posisi pemerintah dan memperkecil kekuatan partai-partai yang ada.¹⁰⁰ Subhan ZE, Wakil Ketua MPRS yang juga tokoh NU mengomentari dengan kritis UU Pemilu tersebut, menurutnya UU tersebut tidak memiliki relevansi dengan demokrasi. Namun ia berharap UU tersebut dapat menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih demokratis.¹⁰¹

Tak lama setelah itu Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 1969 yang mengharuskan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi anggota dan simpatisan Golkar. Bagi partai politik keluarnya peraturan tersebut jelas merugikan mereka karena sebagian simpatisan mereka berasal dari kalangan birokrasi. Subhan dalam hal ini juga mengkritiknya dengan keras. Ia mengatakan dari sudut yuridis formal keluarnya Permen No. 12 tersebut jelas tidak memenuhi syarat perundang-undangan, sedangkan ditinjau dari sudut material seharusnya minimal diatur oleh UU, bukan hanya Peraturan Menteri. Ditinjau dari sudut kebijakan, pemerintah telah melanggar kebijakan *redressing*, Permen tersebut seharusnya didasarkan pada produk perundang-undang yang jauh lebih tinggi, yaitu merujuk pada UUD 1945 atau TAP MPRS. Bila Permen tersebut tetap dilaksanakan, tindakan Menteri dapat dikategorikan sebagai *onrechmatige overheidsdaad*, tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan. Permen ini mendapat tentangan dari partai-partai

⁹⁹ Mengenai proses pembahasan UU Pemilu ini lihat Daniel Dhakidae “Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik dalam *Prisma* No 12 Tahun 1981, hal. 17-40.

¹⁰⁰ Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 91.

¹⁰¹ Muhammad Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 83. Lihat juga, Chairul Anam, *Jejak Langkah Nahdlatul Ulama*, (Solo: Jatayu, 1985), hal. 258 dan Aminudin, *op. cit.*, hal. 91

Islam. Wakil-wakil partai Islam secara demonstratif memperlihatkan ketidaksukaanya dalam tindakan *walk-out* ketika acara persidangan berlangsung.¹⁰²

Keluarnya Permen diikuti dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan PNS untuk menjadi anggota Korps Karyawan Kementrian Dalam Negeri (Kokarmendagri) yang merupakan embrio dari Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan meninggalkan keanggotaan di partai politik maupun ormas kemasyarakatan lainnya, bila tidak maka ancamannya adalah ditanggalkannya status PNS. Keluarnya peraturan tersebut harus dibaca dalam konteks bahwa pemerintah berusaha membuat PNS hanya loyal kepadanya (monoloyalitas).¹⁰³

Dampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan diskriminatif, tentu mengecewakan para pemimpin partai terutama dikalangan partai-partai Islam. Ini bisa dipahami karena memang elemen-elemen masyarakat yang secara penuh mendukung kelahiran Orde Baru, justru umat Islam dan partai-partainya. Bahkan mereka, seperti yang diperlihatkan oleh NU dan kalangan modernis Islam, bersikap kritis dan berada di garda terdepan sewaktu penyingkiran PKI dan rezim Soekarno. Jadi dapat dipahami bila mereka berharap rezim Orde Baru yang menggantikannya lebih akomodatif pada umat Islam. Ternyata tidak diluar harapan, rezim Orde Baru juga memperlihatkan sikap kerasnya. Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden yang berusaha tampil kembali dalam arena politik dengan mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) mendapat ganjalan. Sewaktu akan dideklarasikan, partai ini tidak mendapat restu dari pemerintah dan akhirnya lama kelamaan tenggelam.¹⁰⁴

Sayap Islam modernis yang diwakili orang-orang ex Masyumi, berupaya memperjuangkan rehabilitasi partainya. Sebagian warga Masyumi pasca dibubarkannya partai tersebut di tahun 1960, ada yang bergabung dengan partai-partai Islam lainnya seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan ada juga yang menyibukkan dirinya bergiat dalam sejumlah aksi-aksi sosial seperti pendirian universitas swasta.¹⁰⁵ Tanggal 16 Desember 1965, Badan Koordinasi Amal Muslim terbentuk yang menyatukan 16 ormas Islam yang ingin merehabilitasi Masyumi. Namun menjadi jelas sikap pemerintah Orde Baru tidak dapat menerima rehabilitasi tersebut, sebagaimana pernyataannya di bulan Desember 1965 :

“Akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan dari aliran mana saja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan melalui pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (sebuah

¹⁰² Aminudin, *op. cit.*, hal. 92. Mengenai pemberlakuan Permen tersebut juga lihat Daniel Dhakidae, *Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik*, *op. cit.*, hal. 192, M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 167, Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 92-93.

¹⁰³ Aminudin, *op. cit.*, hal. 93.

¹⁰⁴ Untuk jelasnya lihat Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 647-649.

¹⁰⁵ Lihat Alan Samson, *Islam in Indonesian Politics, Asian Survey*, Desember 1968, No. 12, Vol. VII, p. 1005. Juga dikutip oleh B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1985), hal. 157.

gerakan Islam fanatik yang paling kuat pada 1950-an dan memperoleh basis dukungannya di Jawa Barat-yang berupaya mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata) dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia”.¹⁰⁶

Dalam jawabannya atas surat yang dilayangkan mantan Ketua Umum Partai Masyumi, Prawoto Mangkusasmito pada Januari 1967, Soeharto membenarkan tindakan Soekarno membubarkan partai tersebut, “yang tidak pernah secara resmi mengutuk perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya” yang mendukung pemberontakan PRRI. Soeharto menyimpulkan “faktor-faktor hukum, politik dan psikologis telah mendorong ABRI berpendapat, tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi.¹⁰⁷ Hal senada dikuatkan dengan pernyataan Soeharto pada awal 1971 yang menegaskan bahwa “militer tidak dapat menyetujui rehabilitasi kembali Masyumi”.¹⁰⁸

Menyadari tidak disetujuinya kebangunan Masyumi, maka para pemimpinnya berkesimpulan mereka haruslah lebih luwes dalam menyikapi perkembangan yang ada. Mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah partai baru yang diberi nama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang akan menampung aspirasi orang-orang ex Masyumi dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pemerintah. Soeharto menyatakan tidak berkeberatan dengan pembentukan partai baru ini asal saja partai ini tidaklah merupakan kelanjutan dari partai Masyumi.¹⁰⁹

Pada tanggal 5 Februari 1968 pemerintah menyatakan bahwa Parmusi diizinkan berdiri dengan syarat, tidak ada seorang pun mantan pemimpin Masyumi yang memegang peranan penting dalam partai baru tersebut. Sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 1967, Muhammad Natsir, mantan Ketua Umum Masyumi, menyatakan ketidaksediaannya untuk memimpin Parmusi. Kongres Parmusi yang pertama akhirnya di gelar di Malang tanggal 4-7 November 1968. Kongres tersebut tidak mengindahkan peringatan yang diberikan Soeharto sebelumnya,¹¹⁰ dengan tetap memilih Mohammad Roem, orang Masyumi lama untuk memimpin Parmusi.¹¹¹ Pemerintah yang melihat hasil tersebut menolaknya dengan cepat. Masih dalam arena kongres, pemerintah melalui telegram yang dikirimkan Menteri Sekretaris Negara Alamsyah Ratu Perwiranegara menyatakan bahwa pemerintah menolak hasil kongres. *Lobbying* yang dilakukan para pemimpin Masyumi tetap tak merubah keputusan pemerintah. Akhirnya setelah kompromi antara dua kubu berjalan alot pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70

¹⁰⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi, (Jakarta: Paramadina: 1998), hal. 112 dan Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 246.

¹⁰⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Harorld Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, diterjemahkan oleh Th. Sumartana, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal. 292. Juga dikutip oleh Aziz Thaba, *op. cit.*, hal. 247.

¹⁰⁸ Bahtiar Effendy, *op. cit.*, hal. 112.

¹⁰⁹ Ini dinyatakan dalam pidatonya sebagai Pejabat Sementara Presiden RI di depan DPRGR pada 16 Agustus 1965. Lihat Harord Crouch, *op. cit.*, hal. 292-293 dan dikutip juga oleh Aminudin, *op. cit.*, hal. 87.

¹¹⁰ Beberapa hari sebelum kongres di gelar Ketua Pelaksana Harian Parmusi bertemu dengan Soeharto untuk melaporkan rencana kongres, mereka mendengar langsung ketidaksetujuan pemerintah bila kongres mengakomodasi pemimpin-pemimpin Masyumi dalam Parmusi. Lihat, Muhammad Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Politik Islam Orde Baru*, (Jakarta: Paramadian, 1995), hal. 34.

¹¹¹ Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia, Respon Cendikiawan Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmadi Thaha, (Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987), hal. 105.

Tahun 1968 yang menyatakan bahwa kepemimpinan Parmusi berada di tangan Djarnawi Hadikusumo sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Lukman Harun.¹¹²

Persoalan Parmusi belum selesai, pemerintah melalui tangan-tangan opsusnya ingin memastikan Parmusi sebagai partai yang lemah dan tidak akan menantang pemerintah dalam pemilu nanti. Karena itu operasi intelijen dilancarkan untuk memporak-porandakan partai ini. Dimulai dengan sejumlah kekisruhan internal yang dilakukan Jailani Naro dan Imron Kadir, dua tokoh yang dikenal pro pemerintah, mereka mengkritik kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun yang dinilainya telah memperhadap-hadapkan Parmusi dengan pemerintah. Sebagai klimaksnya Naro dan Kadir lantas mengkup dan membentuk kepemimpinan tandingan pada 17 Oktober 1970.¹¹³ Samson memberikan analisisnya bahwa kudeta tersebut tentu dilakukan oleh Naro atas persetujuan pihak militer untuk memecah belah Parmusi.¹¹⁴ Atas kup tersebut lantas kepengurusan Djarnawi bersidang dan memecat Naro dan Kadir dari keanggotaan partai. Sebaliknya Naro dan Kadir dengan keputusan yang sama juga balas memecat Djarnawi dan Lukman Harun. Aksi pecat memecat berlangsung berlarut-larut hingga akhirnya mengundang pemerintah yang memang telah menunggu-nunggu kesempatan itu datang, masuk untuk menawarkan diri sebagai mediasi. Naro dan Kadir menerima tawaran pemerintah dengan gembira sementara Djarnawi dan Lukman Harun menerimanya walau dengan berat hati daripada nanti di tuduh tidak mempunyai itikad baik untuk berdamai.

Akhirnya melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 77 pemerintah menunjuk orang ketiga untuk memimpin Parmusi yaitu H.M.S. Mintaredja, tokoh Muhamadiyah yang akomodatif dengan pemerintah sebagai Ketua Umum. Mintaredja sendiri bukan anggota Parmusi, karena itu pengangkatannya dengan segera menimbulkan protes oleh kelompok Djarnawi dan Lukman Harun. Mulai saat itulah kedua kubu terlibat perang dingin dan kubu Mintaredja yang berkuasa segera menyingkirkan kelompok Djarnawi dalam kepengurusan partai atau dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif.¹¹⁵

Dalam situasi yang demikianlah pemilu 1971 akhirnya diselenggarakan, hanya saja bagi partai politik lain penundaan pemilu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya justru kurang menguntungkan mereka. Partai-partai politik selain Golkar mengikuti pemilu dibawah tekanan. Sebelumnya Partai Nasional Indonesia pasca G30S/PKI terbelah, kekuatannya jelas berkurang. Faksi “kiri” di tubuh PNI menyusul penghancuran PKI dilumpuhkan. Ali Sastroamidjojo dan Ir. Surachman, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNI disingkirkan melalui kongres yang dipantau secara ketat oleh pemerintah Orde Baru. Menggantikan posisi mereka, Osa Maliki dan Usep Ranuwihardja yang sebaliknya didukung oleh pemerintah Orde Baru.¹¹⁶ Alhasil dengan rusaknya

¹¹² Aziz Thaba, *op. cit.*, hal. 248.

¹¹³ Lihat Nasir Tamara, Sejarah Politik Islam Orde Baru, *Prisma*, 1988, Kamal Hasan, *op. cit.*, hal. 104-105 dan Aminudin, *op. cit.*, hal. 88-89.

¹¹⁴ Samson, *op. cit.*

¹¹⁵ Aminudin, *op. cit.*, hal. 248-251.

¹¹⁶ Untuk lebih jelasnya mengenai mengenai hal ini lihat karya Nazaruddin Sjamsuddin, *PNI dan Kepolitikannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984). Juga lihat J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi, Bangkit dan*

infrastruktur partai dan kekuatan basis massanya yang porak-poranda karena kedekatan elemen kirinya dengan Soekarnoisme dan PKI, membuat PNI pada pemilu 1971 hanyalah berada di urutan keempat setelah Golkar, NU dan Parmusi dengan perolehan suara 2.793.266 atau 6,94% dari total jumlah suara, dengan perolehan kursi sebanyak 58 kursi di Parlemen.¹¹⁷ Hasil ini tentu jauh dibandingkan dengan perolehan suara PNI di pemilu 1955 yang memperoleh 8.434.653 suara atau 22,3% dari total jumlah suara yang masuk dengan memperoleh sebanyak 57 kursi di Parlemen.¹¹⁸

NU sendiri suaranya relatif hampir sama dengan perolehan kursi di Parlemen. Kalau pemilu tahun 1955 NU berada di urutan ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.955.141 suara atau 18,4% dengan jumlah kursi di Parlemen sebanyak 45 kursi,¹¹⁹ maka di pemilu 1971 perolehan suaranya naik menjadi 58 kursi atau 18,7% yang menempatkannya dalam urutan kedua.¹²⁰ Dengan kondisi demikian maka hanya NU lah yang perolehan suaranya relatif lebih baik dibandingkan partai-partai lain. Karena itu di awal-awal Orde Baru, NU termasuk salah satu kekuatan politik yang diwaspadai oleh pemerintah dan ini menyebabkan seperti yang dikatakan Mitsuo Nakamura, NU dari hari ke hari semakin radikal.¹²¹

Hasil pemilu 1971 melegakan pemerintah, namun juga banyak yang kaget dengan perolehan suaranya, bagaimana mungkin Golkar yang baru ikut pemilu untuk pertama kalinya dapat memenangkan suara signifikan itu (62,8%). Ada pengamat yang berpendapat kemenangan itu merupakan kombinasi dari kecurangan, intimidasi dan berpihaknya birokrasi dan militer pada Golkar.¹²² Ernest Utrecht, intelektual kiri dari Belanda berkomentar “*The second Indonesian election, wich were held on 3 July 1971, were won by the army sponsored Golongan Karya. Using intimidation and threts, arresting opponents regarded as dangerous, misusing government facilities, and putting in to practice the fraudulent system of bebas partai*”.¹²³

Andree Feillard mencatat sejumlah intimidasi yang ditujukan pada saingan terkuat Golkar, NU. Babinsa di tingkat desa-desa mengadakan pengawasan politis dan seringkali terlibat dalam sejumlah intimidasi, seperti dipaksa untuk menandatangani pernyataan meninggalkan partai NU, dilarang meninggalkan tempat tinggal selama masa kampanye atau intimidasi fisik seperti pemukulan, penahanan dan disuruh berjalan kaki sejauh 50 km. Bahkan dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif pemerintah mencoret

Runtuhnya PNI 1946-1965, (Jakarta: Grafiti, 1991), hal. 436-437 dan Manuel Kaisiepo, “Dilema Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan Mencari Identitas” dalam *Prisma* No. 12, 1981, hal. 68-83.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana, Masri Maria dan Parakritri T. Simbolon, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal. 84-85.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, *op. cit.*, hal. 170.

¹²¹ Mitsuo Nakamura dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dkk, (Yogyakarta: LKIS, 1997), hal. 58-75.

¹²² Keneth E. Ward, *The 1971 Election In Indonesia, An East Java Case Study*, *Monash Papers on Southeast Asia*, No. 2, 1974.

¹²³ Ernest Utrecht sebagaimana yang dikutip M. Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 170. Juga dikutip oleh Aminudin, *op. cit.*, hal. 96.

beberapa nama yang diusulkan oleh NU dengan menyatakan bahwa nama-nama tersebut terkait dengan kelompok bawah tanah Darul Islam. Reaksi para ulama amat keras dengan tekanan tersebut. Pada bulan April 1971, 700 ulama berkumpul di Tebu Ireng dan mengeluarkan fatwa yang meminta pemerintah untuk menghentikan intimidasi-intimidasi tersebut.

Di wilayah pedesaan sosok Subhan menjadi model perjuangan dalam menghadapi kesewenangan pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemungutan suara akan dicurangi dan “NU sudah menanggalkan sarungnya untuk lebih cepat berlari dalam perlombaan dengan Golkar”. Ia juga mengatakan NU akan membuka posko-posko pengaduan dan bantuan hukum bagi warga yang mengalami intimidasi. Slogan-slogan *jihad* mulai terdengar yang kemudian di jawab oleh Presiden Soeharto, pemerintah akan membalasnya dengan semangat *jihad* pula.¹²⁴ NU dituduh sedang mempersiapkan pemuda-pemuda Anshor yang tergabung dalam Komando Jihad untuk mengadakan aksi-aksi ekstrimis, Yusuf Hasyim menjelaskan bahwa lencana Anshor yang bertuliskan “*Djihad Fi Sabilillah*” adalah peninggalan saat konfrontasi dengan PKI dulu yang sekarang sudah tidak memiliki arti lagi. Menteri Agama KH. Dahlan yang juga tokoh NU, juga mengumumkan sikapnya “Pembangunan bukanlah hasil karya suatu golongan saja”.¹²⁵ Kemenangan Golkar dengan cara-cara yang dianggap tidak sah membawa NU pada posisi yang sebenarnya selalu dihindari, yaitu menjadi oposisinya pemerintah. Pemilu yang telah berlangsung meninggalkan rasa permusuhan, aliran radikal telah semakin berkembang di tubuh NU seperti yang ditunjukkannya di Parlemen.¹²⁶

Menganggapi kemenangan Golkar, Ali Moertopo berpendapat lain. Ia mengatakan justru kemenangan Golkar merupakan tanda bahwa Golkar memperoleh legitimasi dari rakyat, “bahkan dapat dikatakan dengan pemilu 1971 itu rakyat hendak menunjukkan bahwa seluruh harapannya ditumpukan pada Golongan Karya”.¹²⁷ Dengan perolehan kursi sebanyak 227 kursi ditambah dengan 100 kursi yang berasal dari ABRI, maka posisi pemerintah menjadi mayoritas di Parlemen sebanyak 337 kursi yang dengan kekuatan tersebut pasti dapat memblok apa saja yang dirasakan mengancam dan menggerogoti kekuasaan pemerintah. Mengenai hasil pemilu 1971, Liddle memberikan komentar menarik:

“Semua partai politik terkubur di bawah tanah longsor Golkar. PNI, partai nasionalis yang memperoleh suara paling banyak dari partai manapun dalam satu-satunya pemilu nasional sebelumnya di tahun 1955, kehilangan hampir seluruh struktur kadernya ketika Menteri Dalam Negeri mendekritkan monoloyalitas (kepada Golkar) pejabat-pejabat departemen. Parmusi yang Islam modernis, penerus Masyumi, partai terbesar kedua dan secara geografis berbasis paling luas di tahun 1955, dipimpin secara buruk karena campur

¹²⁴ Subhan lantas melunakkan sikapnya dengan mengatakan ini adalah salah pengertian, istilah “*Djihad*” di sini tidaklah diartikan sebagai sikap pemberontakan terhadap pemerintah. Lihat Abdul Basit Adnan, *Kemelut di NU antar Kiyai dan Politisi*, (Solo: Mayasari, 1982), hal. 89. Juga di kutip oleh Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makana*, diterjemahkan oleh Lesmana, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 157.

¹²⁵ Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 155-157.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 159.

¹²⁷ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, *op. cit.*, hal. 68.

tangan pemerintah dan sebab itu tidak mampu menyelenggarakan kampanye yang efektif. Hanya Nahdlatul Ulama, berbasis Jawa pedesaan, dipimpin guru-guru (kyai dan da'i) di luar pemerintah, secara organisasional tidak terganggu melewati tiga rezim kemerdekaan, mengalami peningkatan kecil dari prosentase suaranya di tahun 1955".¹²⁸

Periode awal Orde Baru juga ditandai dengan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk melakukan stabilisasi politik yang bermuara pada keharusan untuk mengadakan penataan partai politik. Partai politik sering dikecam sebagai faktor yang paling signifikan berada dibelakang ketidakstabilan politik seperti yang sering dilontarkan Soekarno,¹²⁹ yang belakangan kritik serupa rupanya juga menjadi keyakinan Soeharto. Keinginan untuk keluar dari "sistem multi partai ekstrem" (partai politik yang berjumlah terlalu banyak) sebenarnya telah dicoba sewaktu Soekarno berkuasa. Penyederhanaan partai pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dari 40 partai lebih menjadi tinggal 12, kemudian 10 saat Masyumi dan PSI dinyatakan sebagai partai terlarang pasca pemberontakan PRRI¹³⁰ dan kemudian berkurang satu lagi pada pertengahan tahun 1965 saat Partai Murba juga dibekukan.¹³¹ Di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) partai-partai harus mengelompokkan diri ke dalam empat kategori Islam, Nasionalis, Kristen dan Komunis berhadapan dengan golongan fungsional.¹³²

Setelah Soekarno tumbang Masyumi dan PSI yang secara politis berpengaruh besar, oleh Soeharto tetap tak diperbolehkan hidup kembali sedangkan Partai Murba sesudah tahun 1965 kembali direorganisasi. Pemerintah Orde Baru sebenarnya juga tidak menyukai banyak partai dan lebih senang menggantikannya dengan golongan fungsional, untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh agama dan ideologi dari sistem politik nasional.¹³³ MPRS sendiri juga menyarankan penyederhanaan partai dalam Ketetapanannya di tahun 1966. Militer dalam hal ini mendukung penuh upaya ini seperti yang ditunjukkannya dalam seminar Angkatan Darat kedua tahun 1966. Penilaian tersebut dijelaskan dalam pernyataan sebagai berikut:

"Fragmentasi dalam kehidupan politik tidak hanya terdapat pada *political elite* ditingkat atas saja, akan tetapi dilandasi pula oleh kekuatan massa sehingga menimbulkan adanya perebutan pengaruh yang tidak sehat dengan penyusunan kekuatan sosial yang berafiliasi dengan partai-partai yang dalam banyak hal

¹²⁸ R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, diterjemahkan oleh Nung Katjasungkana, (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 64.

¹²⁹ Kritik Soekarno bahwa partai sebagai penyebab destabilisasi politik dilontarkan dalam dua pidatonya. Pertama tanggal 28 Oktober 1956 di depan pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua partai dan tanggal 30 Oktober 1956 di depan Kongres Persatuan Guru. Dalam pidatonya ia menyerukan "*Marilah Kita Kubur Partai-Partai*". Lihat Soekarno, *Pilihlah Demokrasimu Yang sejati*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1956).

¹³⁰ Dilarang karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI

¹³¹ Partai Murba dituduh berada di belakang gerakan Badan Pembela Soekarno (BPS) sebuah gerakan yang didirikan oleh lawan-lawan PKI untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh PKI. Soekarno sendiri menilai gerakan tersebut sebagai kontra revolusi dan mengatakan justru BPS ingin "membunuh (ajaran) Soekarno dengan Soekarnoisme sendiri". Partai Murba juga dituduh mendapatkan dana 100 juta dolar AS sebagai dana untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno.

¹³² David Reeve, *Golkar of Indonesia: an Alternative to the Party System*, (Singapore: Oxford University Press, 1985), hal. 166. Juga dikutip oleh Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 171.

¹³³ Reeve, *op. cit.*, hal. 289 dan Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 171.

sering menjalankan fungsi sebagai berikut: Alat untuk mencapai kedudukan formil dalam melaksanakan program politik secara formil dan legal (dalam kabinet maupun lembaga-lembaga pemerintahan lain); Alat untuk mencapai tujuan politik dalam berbagai bidang sosial, politik dan sosial ekonomi (perburuhan, tani, budaya, pemuda dan mahasiswa; sebagai *pressure group* dan alat *blackmail policy*). Penyusunan *pressure group* tidak hanya dilakukan oleh partai-partai besar saja, tetapi juga oleh partai-partai kecil yang gerak-geriknya dibantu oleh *political elite* yang berada di belakang pemerintahan”.¹³⁴

Angkatan Darat dalam hal ini bukanlah satu-satunya yang mempertanyakan sistem “multi partai ekstrim”, namun mantan Wakil Presiden salah satu *founding fathers* yang wibawanya amat dihormati, Muhammad Hatta, juga mengecamnya. Demikian pula Mochtar Lubis, wartawan senior yang kritis dan juga pemimpin harian *Indonesia Raya* serta Direktur Radio dan Televisi, Umar Kayam, juga menyalahkan partai politik yang dinilai terlalu memikirkan kelompok mereka daripada pembangunan nasional.¹³⁵

Tahun 1966 Angkatan Darat menawarkan konsep jalan keluar bagi penyederhanaan partai politik dengan membedakan lima kelompok; golongan Islam, golongan Kristen-Katolik, golongan nasionalis, golongan sosialis Pancasila dan terakhir Golkar yang tidak berafiliasi (dengan catatan yang berafiliasi diwajibkan masuk ke partai politik). Sebuah RUU Kepartaian juga menyarankan dibentuknya tiga kelompok; nasionalis, agama dan Pancasila sosialis. Baru pada Maret 1967 Soeharto yang baru dua bulan dilantik sebagai Presiden mengusulkan secara terbuka agar partai-partai yang ada berfusi.

Reaksi terhadap usulan tersebut memang ramai berdatangan, Idham Chalid, pemimpin NU menyatakan tidak ada kekuatan yang dapat menghapus NU dari Indonesia, kecuali Allah, seraya menambahkan bahwa NU dengan senang hati mau bekerjasama dengan partai lain namun tidak berarti berfusi dengan mereka. Isyarat bagi peminggiran partai politik terlihat ketika Soeharto hanya mengakomodasi beberapa orang saja untuk masuk dalam kabinetnya di tahun 1968. Namun saat bersamaan Soeharto juga menjamin tidak ada satu partaipun yang akan dilarang. Sebelum Pemilu Soeharto mengusulkan sembilan partai yang ada bergabung saja dalam tiga kelompok. Kelompok pertama partai-partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa meninggalkan material, dan yang kedua kelompok partai-partai yang menekankan pembangunan materil tanpa meninggalkan spiritual. Kelompok ketiga sendiri adalah Golkar yang merupakan mesin politik yang dipersiapkan Orde Baru. Namun karena mendapat tantangan yang hebat dari partai-partai yang ada, maka rencana tersebut tidak segera terlaksana.¹³⁶

Bagi NU penyederhanaan partai mungkin saja akan membawa keuntungan dengan hilangnya partai-partai kecil, namun resiko yang lebih besar pun bisa saja terjadi, NU akan berada di bawah dominasi partai Islam yang lain. Sadar bahwa fusi tidaklah dapat dihindarkan lagi, Mukhtamar segera menyerahkan pada Pengurus Besar untuk mengadakan perubahan aturan organisasi untuk disesuaikan dengan aturan-aturan yang

¹³⁴ Sebagaimana yang dikutip oleh Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 171-172.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 172.

¹³⁶ Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 173.

berlaku. Fusi tersebut mulai diberlakukan ketika beberapa cabang dapat menerimanya seperti yang dilakukan cabang-cabang se Sumatera Utara di Medan tanggal 12 November 1972. Tentu harapan yang tersisa dari NU adalah di partai “persatuan” nanti ia tetap menjadi kekuatan dominan.¹³⁷

Setelah kemenangan Golkar di Pemilu 1971 partai-partai politik di *faitac compli*, pemerintah menyatakan mulai saat itu DPR akan dibagi menjadi empat golongan, yaitu; Angkatan Bersenjata, Golkar, golongan pembangunan demokrasi dan golongan pembangunan persatuan. Semula partai-partai Islam dan Kristen akan digabungkan dalam satu partai yang berbasiskan pada spiritual material, namun Partai Katolik Indonesia dan Parkindo menolak untuk digabungkan dan mengancam akan membubarkan diri bila harus dipaksa bergabung dengan partai-partai Islam.¹³⁸ Partai-partai Islam sendiri kemudian mengelompok dalam golongan keempat dengan 94 kursi, sedangkan semua partai non Islam bergabung dalam golongan ketiga dengan 35 kursi. Golkar muncul sebagai kekuatan mayoritas, dengan perolehan suara sebanyak 231 kursi.¹³⁹ Partai-partai tersebut juga diberitahu untuk mengadakan pengelompokan yang sama di DPR.¹⁴⁰

Untuk keperluan tersebut Soeharto menunjuk Kepala Operasi Khusus, Ali Moertopo, Kepala Bakin, Mayor Jenderal Sutopo Yuwono dan Brigadir Jenderal Tjokropranolo untuk menghubungi pimpinan PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik di satu pihak dan partai-partai Islam di pihak lain. Pengelompokan ini berlanjut dalam pembagian kursi di DPR. Di MPR hasil pemilu 1971 sudah diputuskan tentang penyederhanaan partai politik, malah secara tegas sudah dinyatakan hanya ada tiga partai politik peserta pemilu 1971. Realisasinya tinggal hanya menunggu UU Kepartaian yang akan segera disahkan mengingat kuatnya posisi pemerintah dan para pendukungnya, Golkar serta Fraksi TNI dan Polri di DPR.¹⁴¹

Fusi yang dipaksakan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus, adakalanya fusi menimbulkan pertikaian di lingkungan internal partai. PSII contohnya, pimpinan PSII di bawah kepengurusan H. M. CH. Ibrahim dan Bustaman dengan tegas menentang fusi tersebut. Pimpinan Pusat PSII malah mengedarkan instruksi No. 193 tertanggal 18 Oktober 1972 yang meminta kepada seluruh cabang-cabang partai untuk tidak menghadiri rapat-rapat yang membicarakan fusi tersebut. Lebih jauh Pimpinan Pusat juga meminta pengurus cabang yang terlanjur meyetujui fusi partai, untuk mengundurkan diri. Kebijakan Pimpinan PSII menyulut aksi “kudeta” oleh “Tim Penyelamat PSII” yang dilakukan MA. Gani, Thayeb Gobel dan kawan-kawan. Mereka mengatakan apa yang

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 174.

¹³⁸ Aminudin, *op. cit.*, hal. 97.

¹³⁹ Umaidi Radi, *Strategi Partai Persatuan Pembangunan 1973-1982*, (Jakarta: Integrita, 1984), hal. 76, juga dikutip Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 173.

¹⁴⁰ Reeve, *op. cit.*, hal. 290, juga dikutip oleh Andree Feillard, *op. cit.*, hal. 173.

¹⁴¹ Aminudin, *op. cit.*, hal. 97-98.

dilakukan Pimpinan PSII sungguh berbahaya, karena bisa saja sikap keras PSII mengundang pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut.¹⁴²

Dikalangan partai-partai Islam selain NU dan PSII, fusi partai ditanggapi lebih positif oleh Parmusi dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti). Parmusi yang mengalami konflik internal seperti yang telah dijelaskan diatas, jelas tidak dapat berbuat apa-apa dengan rencana pemerintah tersebut. Sedangkan Perti sendiri yang dicurigai dekat dan dipengaruhi oleh PKI, terkena pembersihan besar-besaran sepanjang tahun 1966 sampai sebelum pemilu 1971.¹⁴³ Karenanya Perti tak dapat berbuat apa-apa selain mengikuti kemauan pemerintah, apalagi banyak tokoh-tokohnya yang menyeberang ke Golkar.¹⁴⁴

Setelah melewati perundingan akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta di sepakatilah pendirian partai dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam konfederasi PPP tersebut terlihat adanya kompromi yang maksimal dari partai-partai yang ada dengan mengacu pada perimbangan kekuatan yang didasarkan pada hasil pemilu 1971. Kesepakatan tersebut yang populer dengan sebutan “konsensus 1975” nantinya dipakai untuk mendistribusikan kekuatan yang dimiliki partai. Dalam hal ini secara umum dapat dikatakan NU adalah unsur terbesar di PPP dan karena itu posisinya menjadi amat bergengsi dengan duduknya Idham Chalid sebagai Presiden Partai dan KH. Bisri Syamsuri sebagai Ketua Majelis Syuro. Untuk jabatan eksekutif partai dijabat oleh H.M.S. Mintaredja dari Muslimin Indonesia (pengganti Parmusi).

Persoalan di sekitar unsur-unsur tersebut nantinya menjadi persoalan yang pelik dan seringkali menjadi sumber konflik yang paling potensial. Tentang proses fusi tersebut Mahrus Irsyam memberikan komentar kritisnya:

“.....fusi di PPP cukup unik, masing-masing organisasi tidak melebur menjadi satu sebagaimana yang terjadi di PDI. Hanya aspirasinya saja yang lebur, sedangkan di luar itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing unsur memiliki “dua wajah” : politik dan non politik. Persoalan yang menyelimuti PPP di kemudian hari, antara lain disebabkan oleh sosok seperti itu. Acapkali wajah non politik mempengaruhi wajah politik, atau sebaliknya...Tidak tuntas memang karena secara riil masing-masing bermain politik di PPP”.¹⁴⁵

Hal yang sama juga terjadi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik, fusi juga

¹⁴² Aminudin, *op. cit.*, hal. 98. Uraian yang lebih lengkap mengenai kronologis peristiwa tersebut dan penyebabnya dapat di baca dalam Valina Singka, *op. cit.* Sedangkan versi kelompok Ibrahim atas peristiwa tadi lihat, Mukhtarom El Moekry, *PSII-1905 Di Zaman Orde Baru 1966-1998, Pengalaman dan Pemikiran Presiden Dewan Partai Dr. H. Bustaman SH*, (Jakarta: Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar, 2000), hal. 120-122 dan Ohan Sudjana, *Liku-Liku Perjuangan Syarikat Islam*, (Jakarta: DPP PSII 1905, 1999), hal. 157-202. Aksi “kudeta” ini nantinya berimbas cukup jauh, PSII sejak tahun 1972 hingga sekarang berpecah menjadi dua, “kubu Matraman” dan “kubu Latumenten”.

¹⁴³ Lihat Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, diterjemahkan oleh Azmi dan Zulfahmi, (Jakarta: Obor, 2005), hal. 386. Juga lihat Mestika Zed, Edy Utama dan Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1965*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal. 233.

¹⁴⁴ Audrey Kahin, *op. cit.*, hal. 402.

¹⁴⁵ Mahrus Irsyam sebagaimana yang dikutip oleh Aminudin, *op. cit.*, hal. 100.

telah menimbulkan persoalan. Identitas partai-partai yang tergabung dalam PDI begitu beragam; nasionalisme, Kristen dan haluan marxis nasionalis telah membingungkan massa di tingkat *grass road*.¹⁴⁶

Tidak puas dengan keberhasilan Golkar dalam memenangkan pemilu 1971, pemerintah kembali menjalankan strateginya untuk menjauhkan massa dari kehidupan politik. Bermula dari thesis stabilitas politik yang dipercayai sebagai teori dalam menopang pembangunan nasional, maka pemerintah memperkenalkan konsep *floating mass* sebagai bagian integral dari restrukturisasi partai-partai politik. Konsep ini ditujukan untuk “mengakhiri secara permanen segala bentuk mobilisasi massa terbuka dan tidak boleh lagi ada pergerakan”.¹⁴⁷ *Floating mass* diarahkan untuk mengembangkan massa pemilih agar tidak terombang-ambing dalam kegiatan politik sehari-hari. Konsep ini praktis melarang setiap partai politik dan Golkar untuk memiliki kepengurusan di bawah Daerah Tingkat II, yang diharapkan dengan kebijakan tersebut maka massa akan berjarak dengan politik dan sepenuhnya diharapkan akan berkonsentrasi pada program-program pembangunan.¹⁴⁸ Dalam karya Ali Moertopo “25 Tahun Akselerisasi Modernisasi Pembangunan” gagasan *floating mass* jelas terlihat. Ia mengatakan :

“Partai-partai politik itu senantiasa berusaha menghimpun kekuatan massa melalui pembentukan berbagai organisasi afiliasi atas dasar ideologi partai-partai induknya. Massa rakyat khususnya di desa-desa selalu menjadi korban kepentingan politik dan korban kepentingan ideologi partai-partai yang bersangkutan. Terlibatnya mereka dalam pertentangan kepentingan politik dan ideologi sempit telah menyebabkan kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhannya akan kemajuan dan perbaikan hidup, baik materiil, maupun spiritual, menjadi terabaikan.

Kedaan semacam itu hendaknya tidak terulang lagi. Oleh karena itu mengingat bahwa bahkan hingga kini orientasi pada ideologi sempit itupun belum seluruhnya ditinggalkan oleh partai-partai, sudah selayaknya bila rakyat, yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan, dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik dan ideologi sempit dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masing-masing. Untuk itu wajarlah bila kegiatan partai politik dibatasi sampai Daerah Tingkat II. Disinilah letak makna dan tujuan dari proses depolitisasi dan deparpolisasi bagi desa-desa.

Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa rakyat di desa-desa tidak bisa mempunyai aspirasi-aspirasinya sendiri, termasuk aspirasi politik. Di samping kesempatan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka ke arah pembangunan masyarakatnya sendiri, dalam pemilihan umum mereka dapat menentukan pilihan pada golongan-golongan, baik partai politik maupun Golkar, yang dipandangnya mampu untuk menyalurkan aspirasi mereka dan mempunyai

¹⁴⁶ Manuel Kaisiepo, Dilema Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mencari Identitas, *Prisma*, No. 12 desember 1981, hal. 68-83.

¹⁴⁷ Max Lane, *Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto*, diterjemahkan oleh Daniel Indrakusuma, (Jakarta: Reform Institute, 2007), hal. 42.

¹⁴⁸ Priyo Budi Santoso, *op. cit.*, hal. 103.

program perjuangan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka.

Dengan demikian rakyat di desa-desa tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaganya yang berharga untuk melibatkan dirinya dalam kancah perjuangan politik partai dan golongan, tetapi menyibukkan diri dalam usaha-usaha pembangunan, sehingga di dapatlah apa yang dapat disebut sebagai *floating mass* yang tidak terikat secara permanen dalam keanggotaan suatu partai politik. Disamping dapat diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan, *floating mass* ini akan merupakan dorongan pula bagi kekuatan-kekuatan sosial politik untuk mempersiapkan program pembangunan yang akan ditampilkan dan dinilai dalam pemilihan umum, dan golongan yang mempunyai program pembangunan yang menyangkut kepentingan umum akan menang dalam pemilihan umum”.¹⁴⁹

Moertopo mengerti betul hubungan partai politik dengan kemampuannya untuk memobilisasi massa, dan pengelompokan organisasi massa di sekitar partai politik. Kebijakan penindasan dan teror ditujukan pada partai politik yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir massa ke dalam aktivitasnya. Orang-orang desa dilarang untuk beraktivitas politik kecuali saat kampanye pemilu dan ini merupakan kebijakan utamanya dalam melembagakan kepasifan politik.¹⁵⁰ Dunia politik diarahkan untuk menjauh dari masyarakat dan bila perlu kalau aktivitas masyarakat dirasakan sudah di luar batas, maka “pengharaman” dunia politik akan segera dilakukan. Pemerintah menginginkan masyarakat menyibukkan diri dalam pembangunan, hingar bingar dunia politik harus dihindarkan untuk tetap menjaga konsentrasi masyarakat dari fokus utamanya, berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat direduksi hingga tak ubahnya seperti “robot” yang harus bekerja dari waktu ke waktu, tak memiliki hasrat untuk berpolitik dan alhasil dunia politik adalah dunia yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru.

Bila kita perhatikan ini merupakan kebalikan di masa Orde Lama berkuasa. Di masa Orde Lama, massa begitu akrab dengan partai-partai yang memiliki perwakilan hingga ke desa-desa. Bahkan pelibatan massa seringkali dilakukan dengan sangat eksploitatif, sebentar-sebentar massa dikumpulkan dalam rapat-rapat terbuka, diagitasi bahkan diarahkan oleh pimpinan-pimpinan partai untuk melakukan hal-hal yang dapat menaikkan harga tawar partai ketika berhadapan dengan kekuatan politik lainnya.¹⁵¹

¹⁴⁹ Ali Moertopo dalam David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (ed), *Pemikiran sosial dan Politik Indonesia, Periode 1965-1999*, diterjemahkan oleh Tina Gayatri, (Jakarta: Grafiti, 2006), hal. 64-65. Juga dikutip oleh Max Lane, *op. cit.*, hal. 42-43.

¹⁵⁰ Max Lane, *op. cit.*, hal. 43.

¹⁵¹ Di periode ini sering kita lihat konfrontasi massa seringkali terjadi di kalangan akar rumput seperti antara NU dengan PKI, antara Masyumi dengan PKI, antara Masyumi dan NU dengan PKI atau antara partai-partai Islam dengan PKI atau PNI. Ini semua membuat massa di tingkat akar rumput selalu dalam kondisi panas dan gampang di sulut untuk menjadi pertikaian terbuka. Belum lagi negara juga turut meradikalkan masyarakat. Soekarno sepanjang demokrasi dipimpin hingga jatuhnya ia dari kekuasaan selalu berteriak-teriak tentang belum selesainya revolusi. Sepanjang demokrasi dipimpin iklim politik dihiasi dengan slogan-slogan ganyang Nekolim (neo klonialisme), pengusiran Belanda dari Papua yang kemudian dilanjutkan konfrontasi dengan Malaysia yang

Untuk memutus kecenderungan tersebut, maka pemerintah Orde Baru melancarkan apa yang dikatakan pengkritiknya, Max Lane, sebagai “kekerasan kontra revolusi secara masal” dan sepanjang tahun 1965-1968 depolitisasi diberlakukan dengan penindasan yang luas dan aktif.¹⁵² Beberapa tahun kemudian peminggiran massa dari aktivitas politik kepartaian terlihat secara sempurna saat UU No. 3 Tahun 1975 diberlakukan. UU tersebut mengontrol agar kepengurusan partai hanya ada sampai Daerah Tingkat II (kabupaten) saja. Dengan pemberlakuan UU ini, yang bisa kita baca adalah secara implisit masyarakat haruslah berjarak dengan partai, kalau perlu bebas dari pengaruh partai-partai yang ada. Artinya UU ini menghendaki adanya *floating mass* (massa mengambang) terutama bagi masyarakat di pedesaan.¹⁵³

Dengan diberlakukannya konsep *floating mass*, maka masyarakat tidak lagi terikat dengan partai politik. Aspirasi mereka akan ditampung dalam organisasi-organisasi fungsional yang pendiriannya disponsori oleh Golkar tetapi tidak memiliki ikatan formal dengan Golkar. Dengan demikian walaupun konsep *floating mass* diberlakukan, namun bukan berarti masyarakat di pedesaan sepenuhnya terbebas dari aktivitas politik partai. Golkar dalam hal ini dapat mem *bypass* UU tersebut melalui birokrasi perangkat desanya yang otomatis juga anggota Golkar berdasarkan Permen No. 12 Tahun 1969. Posisi demikian tidaklah sama dengan dua partai lainnya, PPP dan PDI. Mereka berdua tidak memiliki aktivitas di tingkat akar rumput, dan karena itu lambat laun berjarak dengan rakyat. Rakyat menjadi kurang *familiar* lagi dengan mereka, paling aktivitas yang mempertemukan partai dengan rakyat hanya terjadi lima tahun sekali saat kampanye dilangsungkan. Bisa dikatakan partai telah kehilangan pilar utamanya, yaitu rakyat, partai menjadi gagal dalam mengemban tugas dan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat¹⁵⁴ yang posisinya sekarang telah digantikan oleh birokrasi.¹⁵⁵

UU No. 3 Tahun 1975 tentang *floating mass* telah menciptakan situasi yang kontradiktif. Di satu sisi UU tersebut menghendaki masyarakat pedesaan berjarak dan steril dari dunia politik, sementara di sisi yang lain saat yang bersamaan, birokrasi malah melebarkan jangkauannya hingga ke pedesaan melalui lembaga-lembaga “perpanjangan tangan” birokrasi seperti LKMD, LMD, KUD, PKK dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tadi selain fungsinya untuk memobilisasi masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun di sisi yang lain juga berfungsi sebagai lembaga yang memobilisasi aspirasi politik masyarakat tak ubahnya seperti parpol. Dengan kata lain

dilihatnya sebagai proyek neokolonialisme. Bagi Soekarno masyarakat haruslah diarahkan untuk *machtsvorming* (massa aksi) untuk memenangkan revolusi.

¹⁵² Max Lane, *op. cit.*, hal. 44.

¹⁵³ Babasari, “Massa Mengambang dan Partisipasinya Dalam Pembangunan Nasional”, *Analisa*, CSIS, 1985

¹⁵⁴ Mengenai tugas dan fungsi partai politik lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta Grasindo, 1992), hal. 116-121.

¹⁵⁵ Priyo Budi Santoso, *op. cit.*, hal. 104

independensi birokrasi tak terjaga, justru di tangan Golkar birokrasi telah berfungsi sebagai perpanjangan tangan Golkar hingga ke desa-desa.¹⁵⁶

Untuk memastikan posisi unggul pemerintah dalam mengendalikan stabilitas politik terhadap potensi para penentangannya, oleh rezim Orde Baru *floating mass* ditempatkan dalam model kepolitikan yang memosisikan negara terlibat dalam segala aktivitas masyarakat. Ini dikuatkan dengan banyaknya hasil kajian para ilmuwan yang menjelaskan model kepolitikan Orde Baru yang sentralistik, yang kesemuanya berujung pada kesimpulan bahwa cara-cara Orde Baru dalam mengelola negara dibangun atas dasar otoriterisme dan pengendalian penuh penguasa atas wacana pembangunan yang berkembang. Karl D. Jackson menyebut model kepolitikan Orde Baru dengan istilah *Bureaucratic Polity*,¹⁵⁷ Mochtar Mas'oeed menyebutnya dengan *Negara Birokratik Otoriter Korporatis*,¹⁵⁸ Richard Robinson menyebutnya dengan *Bureacratic Capitalist State*,¹⁵⁹ Richard Tanter dan Kenneth Young menyebutnya dengan *Negara Militer Rentenir*,¹⁶⁰ Dwight Y. King menyebutnya dengan *Bureaucratic Authoritarian*,¹⁶¹ Olle Tornquist menyebutnya dengan *Rent Capitalis State*,¹⁶² Arif Budiman menyebutnya dengan istilah *Negara Otoriter Birokratik Rente*,¹⁶³ sedangkan Ben Anderson menyebutnya dengan *Negara Pasca Kolonial*,¹⁶⁴ dan Ruth Mc. Vey menggunakan istilah *Beamstenstaat*.¹⁶⁵

Di bidang politik penataan format politik dilakukan melalui beberapa strategi, seperti penyusunan keanggotaan DPR/MPR RI, penataan partai politik/organisasi massa, strategi *floating mass* (massa mengambang) seperti yang telah dijelaskan diatas, pemberlakuan azas tunggal serta kanalisasi potensi kekuatan rakyat yang diarahkan guna mendukung pemerintah dengan jalan pembentukan lembaga-lembagakorporatis. Lembaga-lembaga korporatis seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lain-lain yang pembentukannya

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 105-105. Juga lihat R. William Liddle dalam Donald K. Emerson (ed), *Indonesia Beyond Soeharto, Negara Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, diterjemahkan oleh Donald K. Emerson, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 71.

¹⁵⁷ Karl D. Jackson, "Bureaucratic Polity: a Theoretical Framework for the Analysis of Power and Comunication" dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, *Political Power and Communication in Indonesia*, (Berkeley: University California Press, 1978), p. 3-22.

¹⁵⁸ Mochtar Mas'oeed, *op. cit.*,

¹⁵⁹ Richard Robinson, *Capitalist and the Bureaucratic State in Indonesia 1965-1975*. Phd dissertation, Sydney University, dan "Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State", in *Indonesia*, No. 25, April 1978, p. 17-40.

¹⁶⁰ Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, diterjemahkan oleh Nur Iman Subono, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 1-18.

¹⁶¹ Dwight Y. King, "Indonesia 's New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does It Make", dalam Ben Anderson and Audrey Kahin, *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributors to Debate*, (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1982), p. 104-116

¹⁶² Olle Tornquist, "Rent Capitalism, State and Democracy, a Theoretical Proposition" dalam Arif Budiman (eds), *State and Civil Society in Indonesia*, (Clayton: Monash University 1990), p. 29-50

¹⁶³ Arif Budiman, *Negara dan Pembangunan*, (tt: Yayasan Padi dan Kapas, 1991).

¹⁶⁴ Sebagaimana yang dikutip oleh Vedi R. Hadiz, Politik, *Budaya dan Perubahan Sosial, Ben Anderson Dalam Studi Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 80.

¹⁶⁵ Ruth Mc Vey "The Beamstenstaat in Indonesia" dalam Anderson and Kahin, *op. cit.*, p. 85-91.

disponsori oleh pemerintah dalam rangka menumpulkan potensi revolusioner yang ada dalam kelas-kelas sosial masyarakat tersebut, disamping mempolarisasikannya agar tetap lemah ketika berhadapan dengan penguasa.¹⁶⁶

Terakhir demi untuk menjaga stabilitas pula, keseluruhan inti pengendalian partisipasi politik rakyat ditopang oleh institusi komando teritorial di tubuh Angkatan Bersenjata. Telah sejak awal pembentukan istitusi ini, banyak kalangan didalamnya yang berpendapat bahwa tentara haruslah memiliki peran sentral dalam politik. Mereka berpendapat tentara di Indonesia tidaklah dilahirkan dalam situasi normal, namun dia lahir dalam kancan revolusi sebagai pejuang yang beberapa waktu kemudian baru institusi tentara diadakan. Karena itu seperti yang dikatakan Nugroho Notosusanto mereka terlebih dahulu menjadi pejuang, bagian dari masyarakat yang mengangkat senjata, baru kemudian menjadi prajurit. Sebagai pejuang mereka tidaklah diam dalam melihat perkembangan politik, namun juga turut terpanggil untuk mengatasi persoalan-persoalan pelik bangsa. Militer Indonesia tidaklah bebas dari wilayah politik, politik dan militer adalah dua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶⁷

Dari pemahaman seperti inilah kaum militer di Indonesia mempersepsikan keberadaan dirinya. Di tahun-tahun 1950-an cikal bakal Dwi Fungsi ABRI mulai diwacanakan secara terbuka, ketika Jenderal Nasution merumuskan posisi militer kedalam konsep “*middle way*”. Konsep ini menjelaskan bahwa TNI-AD tidaklah seperti tentara-tentara di negara-negara Amerika Latin yang memainkan peran politik secara langsung, namun juga bukan seperti militer di negara-negara Barat yang memosisikan dirinya hanya sebagai kekuatan pertahanan dan pasif dalam kehidupan politik. Militer Indonesia mengambil “jalan tengah” untuk mengakomodasi keduanya, tidak langsung masuk dalam kehidupan politik seperti melakukan kudeta namun juga tidaklah menjadi penonton saja di arena politik. Perwira-perwira TNI demikian kata Nasution, haruslah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan politik negara, baik ekonomi, keuangan dan bidang-bidang lainnya. Karena itu TNI secara institusi juga harus diberi tempat dalam lembaga-lembaga politik pemerintahan tidak hanya di Dewan Nasional dan Kabinet seperti yang sudah dilaksanakan, tetapi juga institusi-institusi negara lainnya.¹⁶⁸ Di tangan Orde Baru konsep “*middle way*” ini lantas diformalisasikan menjadi “Dwi Fungsi” ABRI, bahkan tertera dalam UU No 20 Tahun 1982 tentang Asas-Asas Dasar Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.¹⁶⁹ Dengan pengadossian Dwi Fungsi ABRI maka legalisasi dunia politik bagi tentara menjadi terbuka. Hal ini semakin nyata ketika jabatan “Kepala Staf Sosial Politik” mulai diperkenalkan dan mengambil posisi yang cukup penting dalam institusi TNI.

¹⁶⁶ Priyo Budi Santoso, *op. cit.*, hal. 35.

¹⁶⁷ Lihat Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).

¹⁶⁸ Ini adalah ceramah Nasution di depan para kadet Akademi militer Nasional (AMN) Magelang tanggal 12 November 1958. Ceramah ini oleh Daniel S. Lev dikatakan sebagai “*a basic document in Indonesian constitutional and political development*”. Lihat Daniel S. Lev, *op. cit.*, hal. 191 dan Nugroho Notosusanto, “Angkatan Bersenjata Dalam Percaturan Politik di Indonesia”, *Prisma*, Vol VIII, No 8, Agustus 1979.

¹⁶⁹ Bilveer Singh, *Dwi Fungsi ABRI, Asal-Usul, Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan*, diterjemahkan oleh Robert Hariono Imam, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 60.

Struktur komando militer di masa ini kemudian diperkuat dengan menghadirkan komando teritorial di semua tingkatan administratif pemerintahan, bahkan dilengkapi satuan-satuan khusus untuk campur tangan dalam kehidupan politik. Badan-badan khusus di tingkat nasional, yang berbasis di Markas Besar Angkatan Bersenjata didirikan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas khusus di bidang politik. Paling penting adalah Komando Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) yang kemudian berganti nama menjadi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS).¹⁷⁰ Bahkan “institusi siluman” seperti Operasi Khusus dibawah pimpinan Ali Moertopo sering dipakai untuk “mengintimidasi”, mengarahkan dan “membina” para pengkritik pemerintah.

Rezim Orde Baru melalui tangan-tangan militernya juga disinyalir terlibat dalam berbagai modus operandi untuk membungkan kelompok oposan. Ini jelas terlihat saat pemerintah memperuncing, kalau tidak ingin dikatakan justru menstimulus hadirnya perpecahan internal organisasi-organisasi yang kepemimpinannya begitu kuat, dan berpotensi membahayakan rezim yang berkuasa. Gus Dur pernah berusaha dijatuhkan saat Abu Hasan yang disponsori pemerintah menantanginya dengan berupaya merebut kepemimpinan PB NU saat Muhktamar di Cipasung tahun 1994, walau akhirnya gagal dan tetap memperoleh mandat untuk memimpin NU.¹⁷¹ Demikian pula Megawati, melalui intrik yang menyertai Kongres Luar Biasa di Medan tahun 1996 ia dijatuhkan, namun justru penggulingannya ini membuatnya semakin populer dan memperoleh dukungan luas dari lingkungan internal PDI.¹⁷²

¹⁷⁰ Max Lane, *op. cit.*, hal. 45.

¹⁷¹ Lihat Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 261-262.

¹⁷² Mengenai indikasi keberpihakan militer pada kubu Soerjadi dalam konflik internal PDI lihat wawancara Syarwan Hamid dalam Irawan Saptono dan Lukas Luwarso, *Megawati Soekarnoputri Pantang Surut Melangkah*, (Jakarta: ISAI, 1998), hal. 159-162.